

**PERAN PEREMPUAN DI BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA DALAM
PENGAMBILAN KEBIJAKAN (STUDI KASUS DI
DESA CIPANG KANAN ROKAN HULU TAHUN 2021)**

SKRIPSI

*Diajukan untuk mencapai gelar sarjana ilmu politik pada fakultas ilmu sosial
dan politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat*

Oleh :

Salwa Zahratih

BP. 21100008



Pembimbing I

Lara Indah Yandri, S.IP, M.IP

Pembimbing II

Didi Rahmadi, S.Sos, M.A

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT
PADANG
2025**

PERAN PEREMPUAN DI BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA DALAM
PENGAMBILAN KEBIJAKAN (STUDI KASUS DI
DESA CIPANG KANAN ROKAN HULU TAHUN 2021)

SKRIPSI

*Dijudikan untuk mencapai gelar sarjana ilmu politik pada fakultas ilmu sosial
dan politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat*

Oleh :

Sulwa Zahratih

BP. 21100008



Pembimbing I

Lara Indah Yandri, S.IP, M.IP

Pembimbing II

Bidi Rahmadi, S.Sos, M.A

PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT

PADANG

2025

PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi dengan judul Peran Perempuan Di Badan Permusyawaratan Desa dalam pengambilan kebijakan (studi kasus didesa Cipang Kaman Rokan Hulu Tama 2011) adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Program Studi maupun diperguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, pemikiran, dan rumusan saya sendiri, tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali bantuan dan arahan dari tim pembimbing.
3. Karya tulis ini tidak tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang ditulis atau di publikasikan oleh orang lain, kecuali dikutip secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan lain yang berlaku.

Padang, 19 Februari 2025

buat pernyataan



[Signature]
ZAHARATI
211000008

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : Salwa Zahratih
Nomor Induk Mahasiswa : 21100008
Judul Proposal Penelitian : Peran Perempuan Di Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengambilan Kebijakan (Studi Kasus Didesa Cipang Kanan Rokan Hulu Tahun 2021)

* Skripsi ini telah disetujui oleh Dosen Pembimbing dan disahkan oleh Ketua Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat *

Pembimbing I

Juwahar M. Anggi, S.IP., M.In
NIDN: 1003128901

Pembimbing II

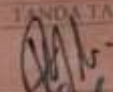



Didi Rahmadi S.Sos. M.A
NIDN: 100108202

Mengesahin
Ketua Program Studi


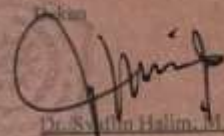
Didi Rahmadi S.Sos. M.A
NIDN: 100108202

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah diuji di depan sidang ujian skripsi Program Studi Ilmu Politik pada tanggal 18 Februari 2025, bertempat di Ruang Sidang Program Studi Ilmu Politik, dengan Tim Penguji:

TIM PENGUJI	JABATAN	TANDA TANGAN
Riko Riyandi, S.IP., M.Si	Ketua	
Lesta Dwi Putri, S.IP., M., Si	Sekretaris	
Lara Indah Yandri, S.IP., M., Ip	Pembimbing I	
Diti Rahmadi S.Sos., M.A	Pembimbing II	

Mengetahui



Dr. Syafiq Halim, M.A
NIDN 1026048305

Peran Perempuan Di Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengambilan
Keputusan (Studi Kasus Di Desa Cipang Kanan Ekokan Hulu Tahun 2021)

Oleh: Salwa Zahrah

Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Abstrak

Salah satu lembaga penting di desa adalah BPD yang merupakan lembaga perwakilan di tingkat desa. Unsur keterwakilan perempuan dan keterwakilan wlayah. Keterwakilan ideal berimplikasi pada organisasi organisasi di desa seperti LMD, PKK, Keswan, dan sebagainya menunjukkan bahwa perempuan memegang peran sentral dalam pembangunan dan kemajuan desa. Oleh karena itu, perempuan menjadi urgensi untuk mendapatkan perwakilan secara proporsional dalam Badan Perwakilan Desa. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori Harary Pasolong untuk diadopsi patokan dalam proses pengambilan kebijakan/keputusan Dipemerintahan Desa Cipang Kanan kurangnya partisipasi perempuan di ranah pemerintahan desa. Perempuan diabaikan malah dan tidak bisa ikut berpartisipasi dibangka pemerintahan. Keterwakilan seorang perempuan dalam proses pengambilan kebijakan di pemerintahan desa sangat rendah karena kurangnya partisipasi perempuan, selain itu juga mempengaruhi faktor peran perempuan dalam pemerintahan desa, dimana peran yang dipegang di bangku pemerintahan sangat sedikit. Sering berjalan wakil perempuan malah terlihat sedikit hadir di instansi pemerintahan desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini metode kualitatif. Hasil penelitian ini adalah Menunjukkan Peran perempuan di BPD dalam pengambilan kebijakan sudah terfasilitasi dengan sangat baik, dilibet dari dengan adanya kebijakan yang dilahirkan oleh keterwakilan perempuan dan didukung penuh oleh seluruh anggota kerja. Kebijakan yang dilahirkan sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di Desa Cipang Kanan.

Kata Kunci: Kebijakan, Keterwakilan Perempuan, Peran Perempuan

The Role Of Women in Village Consultative Bodies in Policy Making
(Case Study in Cipang Kanun Village Rokan Hilir, 2021)
Dita Sabwa Zahrotih
Political Science, Universitas of Muhammadiyah West Sumatera

Abstract

One of the important institutions in the village is the BPD which is a representative institution in the village level. The element of representation and regional representation. The active involvement of women in organizations in the village such as T.D, PKK, cooperatives, etc. Shows that women play a central role in village development. Therefore, women have an urgency to get proportional representation in the Village Representative Body. The Academic Text of the Village Bill states that women's representation in the BPD. In this study, the researcher used Harbani Pasolong's theory as a reference in the policy/decision-making process. In the Cipang Kanun Village government, there is a lack of women's participation in the village government. Women are considered weak and cannot participate in government. The involvement of women in the policy-making process in the village government is very low due to the lack of women's participation, besides that it also affects the role of women in village government, where the positions held in government are very few. Over time, women began to be seen to be slightly present in the Cipang Kanun village government agencies, especially in the Cipang Kanun Village Consultative Body (BPD). The method used in this study is a qualitative method. The results of this study are showing that the role of women in the BPD in policy-making has been realized very well, seen from the existence of policies that are born by women's representation and are fully supported by all work members. The policies that are born are very beneficial to the community in Cipang Kanun Village.

Keywords: Policy, Women's Representation, Women's Role

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat nikmat dan karunia yang telah diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal penelitian ini dengan judul “**PERAN PEREMPUAN DI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENGAMBILAN KEBIJAKAN (STUDI KASUS DI DESA CIPANG KANAN ROKAN HULU TAHUN 2021)**” tujuan dari penulisan menulis proposal ini adalah salah satu persyaratan untuk penulis mencapai gelar Sarjan Ilmu Politik (S.Ip), pada program studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan proposal ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi materi maupun dari pembahasan. Hal ini disebabkan karena keterbatasan pengalaman dan kemampuan serta pengetahuan yang penulis miliki. Disamping ini juga penulis menyadari terselesaikannya proposal ini tidak terlepas dari bantuan pihak pihak yang sukarela memberikan masukan, petunjuk, saran, nasehat, serta motivasi dan do’a dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Allah SWT, atas segala hidayahnya yang diberikan dalam berbagai bentuk dari segi kesehatan, kekuatan dan kesabaran, serta Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi pedoman hidup bagi umatnya.
2. Terimakasih kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat atas kepemimpinan dan visi yang telah menginspirasi kami. Dukungan dan komitmen bapak terhadap pengembangan akademik telah menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kami untuk belajar dan berkembang. Semoga langkah-langkah yang diambil terus membawa kemajuan bagi universitas dan seluruh civitas akademika.
3. Terimakasih kepada Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atas bimbingan dan dukungan yang telah diberikan selama proses penulisan skripsi ini. Kepemimpinan bapak yang visioner dan komitmen terhadap pengembangan akademik telah menciptakan lingkungan yang inspiratif bagi kami. Semoga fakultas ini terus maju dan melahirkan generasi yang berkualitas
4. Kedua orang tua saya, Untuk Ayah (Dinamis) dan Ibu (Nurlaili) terimakasih teruntuk semua bentuk dedikasi kasih sayang, cinta, serta

dukungannya yang tak tergoyahkan yang telah menjadi landasan dalam mencapai akademis saya. Skripsi ini bukan hanya milik saya saja, namun merupakan bukti pengorbanan dan dorongan orang tua saya.

5. Ibu Lara Indah Yanri S.Ip, M,Ip selaku dosen pembimbing Akademik dan pembimbing I skripsi saya, terimakasih yang sebesar-besarnya teruntuk proses bimbingan dan arahan yang diberikan yang telah membuka wawasan dan memperkaya pemahaman saya. Dukungan ibu tidak hanya membantu saya menyelesaikan skripsi ini, tetapi juga membentuk saya menjadi pribadi yang lebih baik. Semoga dedikasi ibu dalam mendidik selalu mendapatkan balasan yang setimpal.
6. Bapak Didi Rahmadi S.Sos, M.A selaku Ketua program studi dan pembimbing II skripsi saya, Terimakasih teruntuk bimbingan, dukungan, dan inspirasi yang diberikan telah menjadi pilar penting dalam perjalanan akademik saya. Semoga dedikasi dan komitmen bapak dalam mendidik generasi penerus selalu mendapatkan penghargaan yang setimpal.
7. Terimakasih penulis sampaikan kepada dosen penguji, dosen-dosen lainnya, dan seluruh staff fakultas ilmu sosial dan politik yang telah memberikan dukungan dan kontribusi berharga selama proses penulisan skripsi ini. Setiap masukan, saran, dan bimbingan yang bapak/ibu berikan telah memperkaya pengalaman akademik saya. Semoga dedikasi dan komitmen bapak/ibu dalam mencerdaskan generasi muda selalu mendapatkan penghargaan yang layak.
8. Terimakasih kepada bapak/ibu dosen-dosen di selingkup Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat yang mengenali saya dan mendukung selama proses studi perkuliahan saya berlangsung. Kehangatan dan perhatian yang bapak/ibu berikan menjadikan saya merasa seperti bagian dari keluarga di perantauan. Bimbingan dan inspirasi bapak/ibu sangat berarti dalam proses penulisan skripsi ini. Semoga kebaikan bapak/ibu selalu mendapatkan balasan yang setimpal

9. Terimakasih kepada anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan seluruh perangkat Desa Cipang Kanan yang telah memberikan dukungan dan bimbingan selama proses penulisan skripsi ini. Tanpa bantuan dan kerjasama yang baik dari semua pihak, penyelesaian skripsi ini tidak akan terwujud. Semoga kerja sama ini dapat terus terjalin demi kemajuan desa dan masyarakat.
10. Terimakasih kepada seluruh informan yang telah bersedia meluangkan waktu dan berbagi pengetahuan serta pengalaman selama proses penelitian ini. Kontribusi Bapak/Ibu sangat berarti dan menjadi fondasi penting dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga informasi yang telah Bapak/Ibu berikan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat.
11. Terima kasih kepada kedua saudara laki laki kandung saya yang selalu menjadi sumber semangat dan inspirasi. Dukungan dan kebersamaan kalian selama proses penulisan skripsi ini sangat berarti bagi saya. Semoga kita semua terus saling mendukung dan mencapai impian masing-masing dan mampu membahagiakan kedua orang tua dalam bentuk apapun.
12. Terimakasih kepada semua keluarga besar saya yang selalu memberikan dukungan dan kasih sayang. Setiap doa, motivasi, dan kebersamaan yang kita jalani telah menjadi kekuatan dalam menyelesaikan proses penulisan skripsi ini. Semoga kita terus bersatu dan saling mendukung dalam setiap langkah kehidupan.
13. Terimakasih kepada semua orang terkasih yang telah menjadi sumber inspirasi dan dukungan selama proses penulisan skripsi ini. Hadir memberikan semangat dan motivasi tak ternilai. Semoga kita selalu saling mendukung dalam setiap langkah menuju impian.
16. Terima kasih kepada rekan-rekan angkatan 2021 yang telah menjadi teman seperjuangan dalam proses penulisan skripsi ini. Kebersamaan, diskusi, dan dukungan satu sama lain telah membuat perjalanan ini lebih berarti. Semoga kita semua terus melangkah maju dan meraih

kesuksesan di masa depan.

17. Terimakasih kepada para senior dan junior di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik yang telah memberikan dukungan dan inspirasi selama proses penulisan skripsi ini. Setiap saran, pengalaman, dan semangat yang kita bagi telah memperkaya perjalanan akademik ini. Semoga kita semua terus berkembang dan berkontribusi positif di bidang kita masing-masing.
18. Dengan penuh rasa syukur, special penulis mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri atas ketekunan, kerja keras, dan semangat yang telah ditunjukkan selama proses penulisan skripsi ini. Setiap tantangan yang dihadapi dan setiap langkah yang diambil telah membentuk perjalanan ini menjadi pengalaman yang berharga. Semoga perjuangan ini menjadi inspirasi untuk terus melangkah maju dan mencapai impian yang lebih besar.

Semoga amal dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan imbalan yang berlipat ganda dari Allah SWT dan akhirnya penulis berharap penulisan proposal ini bermanfaat bagi pembaca serta dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak yang membutuhkan.

Akhir kata, penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang bersifat membangun dan tercapainya kesempurnaan proposal ini dimasa yang akan datang.

Padang, 31 Januari 2025

Salwa Zahratih
Nim: 21100008

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Signifikasi Penelitian.....	6
BAB II KERANGKA TEORI	
2.1 Tinjauan Pustaka	7
KATA PENGANTAR	
2.1.1 Peneliti Terdahulu	7
2.2 Landasan Teori.....	15
2.2.1 Kebijakan	15
2.2.2 Teori Pengambilan Kebijakan atau keputusan.....	16
2.2.3 Peran Perempuan.....	18
1. Defenisi Peran	18
2. Ruang Lingkup Peran Perempuan.....	20
3. Karakteristik Peran Perempuan.....	21
2.2.4 Badan Permusyawaratan Desa	23
2.2.5 Skema Pemikiran	27
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	29
3.2 Lokasi Penelitian.....	30
3.3 Peranan Penelitian.....	30
3.4 Teknik Pemilihan Informan	30
3.5 Unit Analisis	31
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	32
3.7 Triangulasi Data	33
3.8 Analisis Data	34

3.9 Rancangan Struktur Penulisan	35
BAB IV DESKRIPSI LOKASI ATAU OBJEK PENELITIAN	37
4.1 Sejarah Desa Cipang Kanan.....	37
4.2 Letak dan Pemerintahan Desa Cipang Kanan.....	37
4.3 Keorganisasian Desa Cipang Kanan	38
4.4 Pendidikan Desa Cipang Kanan.....	39
BAB V TEMUAN DAN HASIL	40
5.1 Temuan dan Hasil	40
5.2 Proses pengambilan kebijakan	41
5.2.1 Perumusan masalah.....	42
5.2.2 Pemecahan masalah	51
5.2.3 Pengambilan dan pembuatan keputusan/kebijakan.....	54
5.3 Keterwakilan peran perempuan dalam pengambilan kebijakan.....	58
BAB VI PENUTUP	64
6.1 Kesimpulan	67
6.2 Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN	72

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

TABEL

Tabel 1.1 Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian sekarang	11
Tabel 3.1 Informan inti	31
Tabel 3.2 Informan Triangulasi.....	33
Tabel 5.1 Kebijakan pro perempuan desa Cipang Kanan	63

GAMBAR

Gambar 2.1 Skema pemikiran penelitian	27
Gambar 3.1 Proses analisis data kualitatif	34
Gambar 4.1 Peta lokasi penelitian.....	37
Gambar 5.1 Skema keterlibatan perempuan dalam pengambilan kebijakan ...	65

BAB I

PENDAHULUAN

II. LATAR BELAKANG

Pemerintahan desa memainkan peranan penting dalam pengambilan keputusan ataupun kebijakan yang memiliki dampak langsung yang ditemukan dan dirasakan di kehidupan masyarakat.¹ Dalam konteks ini, peran perempuan dalam pemerintahan desa menjadi semakin penting.

Partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan desa memiliki peran penting dalam memperkuat demokrasi lokal. Melibatkan perempuan dalam pengambilan keputusan desa dapat memastikan representasi yang adil dan merata, meningkatkan kualitas keputusan, dan mendorong partisipasi dan keterlibatan masyarakat secara keseluruhan.²

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) 2023, Partisipasi perempuan di pemerintahan Rokan Hulu hanya 4,44%³. Keterwakilan perempuan yang dimandatkan konstitusi masih belum terpenuhi. Persentase jumlah perempuan di Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan perangkat desa minimal 30%. Dapat dilihat bahwa masih belum terpenuhinya kuota dipemerintahan Kabupaten Rokan Hulu. Keterwakilan yang masih sangat kurang untuk posisi perempuan yang bekerja dipemerintahan desa.

Sebab belum terpenuhinya oleh beberapa faktor, yaitu penempatan posisi perempuan pada jabatan strategis sangat kecil, perempuan hanya sebagai pelengkap kursi kosong di parlemen, keikutsertaan perempuan dalam kontestansi di parlemen yang sangat minim serta perempuan selalu dibanding bandingkan dan selalu dianggap tidak bisa ikut andil.

Dalam hal ini menunjukkan bahwa ada upaya untuk meningkatkan keterwakilan perempuan, karena masih adanya kesenjangan yang signifikan. Akan tetapi, padahal keterlibatan perempuan dalam kebijakan publik dapat

¹ *Webdesaku Mekarjaya, Kiarapedes, Pemerintahan desa Mekarjaya, Peran pemerintah desa*

² *Manunggaljaya, Partisipasi Perempuan dalam Pengambilan Keputusan Desa, Ensiklo25 Mei 2024*

³ *BPS, Keterlibatan Perempuan diparlemen 2023, 2 Agustus 2024*

mendorong kebijakan tersebut.⁴

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa peran perempuan menurut Siti Sausan Malida, Menunjukkan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan atau kebijakan sangat masih kurang,⁵ selain itu menurut Audia Jovani, Bahwa perempuan dan laki laki merupakan kunci untuk sebuah keberhasilan pembangunan, karena perempuan dan laki laki memiliki persamaan pemenuhan akses, serta peluang berpartisipasi dalam peran dan posisi pembuatan kebijakan.⁶ Sedangkan menurut Nila Kusuma, Keterlibatan perempuan dalam pembangunan sangat rendah. Karena perempuan tidak terlibat secara efektif dalam penyusunan ataupun pembuatan kebijakan.⁷

Dari beberapa penelitian terdahulu diatas, dapat dilihat bahwa partisipasi peran perempuan dalam perumusan ataupun pengambilan kebijakan masih sangat kurang dan rendah. Perempuan selalu dianggap tidak bisa berpartisipasi di pemerintahan, sehingga dengan konsep yang seperti ini, perlu adanya peningkatan keterlibatan perempuan dalam sektor pemerintahan. Dalam artian, perempuan sangat perlu dilibatkan dengan posisi yang sama seperti laki laki di pemerintahan desa.

Posisi perempuan di desa seringkali dipengaruhi oleh budaya yang patriarki.⁸ Dalam konteks ini, perempuan tidak hanya berperan sebagai pengurus rumah tangga, tetapi juga memiliki potensi dalam berbagai bidang termasuk di pemerintahan. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki peran yang beragam terutama dalam pembuatan kebijakan ataupun keputusan.

Meskipun ada kebijakan yang mendukung pemberdayaan perempuan, banyak perempuan di desa yang memiliki hambatan untuk berpartisipasi

⁴ *Kemenko PMK, Partisipasi politik perempuan bagi kemajuan bangsa, 15 April 2021*

⁵ *Siti sausa malida, partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan, uin ar Ranyri Aceh, 2022*

⁶ *Audia jivani, perlindungan perempuan dan anak, peran pembuatan kepala daerah dalam pembuatan kebijakan responsive gender, Universitas Kristen Indonesia, Jakarta 2024*

⁷ *Nila Kusuma, keterlibatan perempuan desa dalam pembangunan, universitas matarram, juni 2023*

⁸ *Yulia penu, Kesetaraan gender dalam budaya patriarki terhadap kaum perempuan pada ranah public, universitas timor, 2023*

dipemerintahan.⁹ Padahal perempuan desa memiliki peranan penting dalam proses pembuatan kebijakan. Akan tetapi, keterlibatan mereka masih terdapat berbagai rintangan yang dihadapi. Salah satunya adalah anggapan bahwa perempuan selalu dianggap lemah dan tidak bisa ikut andil dalam kepemimpinan diranah publik salah satunya didesa.

Peran seorang perempuan dapat dilihat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yakni ditunjukkan dengan adanya keterlibatan perempuan secara langsung dan tidak langsung dalam pemerintahan desa. Keterlibatan perempuan dalam berbagai tahapan sangat penting, dalam rangka merumuskan kebijakan yang akan dijalankan.

Seiring dengan berjalannya waktu, kini para Perempuan mulai sedikit terlihat hadir dan berperan dalam sistem pemerintahan desa, seperti di Desa Cipang Kanan. Sejak diterapkannya otonomi desa, terdapat dorongan untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan ditingkat lokal. Otonomi desa memberikan kesempatan bagi masyarakat, termasuk perempuan untuk berpartisipasi lebih aktif dalam proses pemerintahan desa dan pembangunan desa¹⁰.

Desa cipang kanan ini, salah satu wilayah di kabupaten Rokan hulu menarik untuk menjadi lokasi penelitian karena perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di isi oleh perempuan. Perangkat desa yang berjumlah 11 orang dan satu diantaranya diisi oleh perempuan. Serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berjumlah 5 orang, dan satu diantaranya diisi oleh perempuan. Asumsinya dengan posisi strategis tersebut, kebijakan yang dihasilkan termasuk anggaran desa lebih diperhatikan. Kebijakan yang dilahirkan oleh desa cipang kanan antara lain yaitu kebijakan pembangunan desa (infrastruktur desa), kebijakan pemerintah desa terhadap partisipasi masyarakat, kebijakan pemerintah desa terhadap pengelolaan dana desa, dan kebijakan dalam tata kelola pemerintahan desa.

⁹ Siska Nadia, *Pemberdayaan perempuan untuk kesetaraan*, 16 Desember 2022

¹⁰ Sakinah Nadir, *Otonomi Daerah dan desentralisasi desa menuju pemberdayaan masyarakat desa*, Vol, 1, Universitas Hasanuddin, Makassar 2013.

Adapun hal yang menarik dari penelitian ini sehingga peneliti mengambil tema dan memilih lokasi tersebut dikarenakan, pada struktur pemerintahan sebelumnya tidak adanya perempuan yang mengisi bangku pemerintahan desa. Sehingga dengan posisi seperti ini, peneliti ingin melihat peran perempuan dalam pengambilan ataupun pembuatan keputusan/kebijakan di Badan Pemerintahan Desa Cipang Kanan.

Adapun pentingnya penelitian ini dilakukan karena untuk mengetahui peran seorang perempuan di Badan Permusyawaratan Desa (BPD), apakah partisipasi seorang anggota perempuan BPD sudah terelisasikan dengan baik serta bagaimana bentuk keterlibatan peran perempuan yang bekerja di sektor Badan Permusyawaratan Desa pemerintahan Desa Cipang Kanan. Pentingnya penelitian ini adalah untuk menentukan realita kondisi akan seorang perempuan dan perannya dipemerintahan desa Cipang Kanan.

Sebelumnya perempuan tidak terlibat diranah pemerintahan karena dianggap lemah dan tidak bisa ikut andil dalam ranah publik, akan tetapi mulai di tahun 2021 perempuan mulai terlibat di ranah pemerintahan Badan Permusyawaratan Desa merupakan suatu hal yang menarik. Sehingga dengan peningkatan keterlibatan ini, peneliti ingin melihat sejauh mana keterlibatan itu dan bagaimana perannya dalam pengambilan ataupun perumusan kebijakan di Badan Permusyawaratan Desa sebagai keterwakilan perempuan dipemerintahan di Desa Cipang Kanan. Penting juga penelitian ini dilakukan untuk memberikan wawasan serta pengetahuan yang lebih luas kepada masyarakat serta pembaca nantinya tentang Peran Perempuan Di Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengambilan Kebijakan di Desa Cipang Kanan Kabupaten Rokan Hulu.

I.2.RUMUSAN MASALAH

Dipemerintahan Desa Cipang Kanan kurangnya partisipasi perempuan di ranah pemerintahan desa. Perempuan dianggap lemah dan tidak bisa ikut berpartisipasi dibangku pemerintahan. Keterlibatan seorang perempuan dalam proses pengambilan kebijakan di pemerintahan desa sangat rendah karena kurangnya partisipasi perempuan, selain itu juga mempengaruhi faktor peran perempuan dalam pemerintahan desa, dimana posisi yang dipegang di bangku pemerintahan sangat sedikit.

Seiring berjalannya waktu, kini perempuan sedikit terlihat hadir di ranah pemerintahan desa Cipang Kanan terutama di Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Jadi, dengan adanya kesenjangan tentang perempuan dianggap tidak bisa berpartisipasi di ranah publik, maka peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana Peran Perempuan Di Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengambilan Kebijakan (Studi Kasus Di Desa Cipang Kanan Rokan Hulu Tahun 2021?)

I.3. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan yang dituju peneliti yaitu Mendeskripsikan peran perempuan di Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengambilan kebijakan di Desa Cipang Kanan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu Riau Tahun 2021.

1.4. SIGNIFIKASI PENELITIAN

1. Manfaat Akademisi

Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang peran perempuan di pemerintahan desa dalam pengambilan kebijakan terkhusus di desa cipang kanan.

2. Manfaat Praktis

Untuk melengkapi kebijakan pemerintah tentang peran perempuan di pemerintahan desa.

3. Manfaat sosial

Dapat bermanfaat bagi sikap dan perilaku sosial masyarakat ditingkat desa mengenai peran perempuan dalam mengambil kebijakan.

BAB II

KERANGKA TEORI

2.1 TINJAUAN PUSTAKA

2.1.1 Peneliti terdahulu

Penelitian terdahulu adalah pedoman yang akan digunakan peneliti dalam melakukan penelitian. Dalam melakukan penelitian ini peneliti melakukan beberapa tinjauan pustaka untuk memperjelas dan memperlengkap bahan penelitain yang telah disiapkan terlebih dahulu sehingga hasil penelitian lebih menarik untuk dipahami dan ditelaah, sebagai berikut:

Pertama, penelitian oleh Hernita Sahban, “ Peran Kepemimpinan Dalam Mengambil Keputusan Di Indonesia” dengan menggunakan topik peran perempuan, kepemimpinan, pengambilan keputusan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang menerapkan unit analisis kelompok. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa hanya beberapa stakeholder perempuan yang berperan dalam memperjuangkan kepentingan perempuan pada perumusan , Selain itu ada juga beberapa stakeholder juga memberikan kontribusi dalam usaha meningkatkan kualitas hidup perempuan.

Dengan terwujudnya peran wanita dalam memegang peranan sebagai kepemimpinan membawa dampak yang lebih baik bahwa permasalahan akan kesetaraan gender ditandai dengan tidak

adanya diskriminasi antara perempuan dan laki laki. Dengan demikian antara perempuan dan laki laki memiliki akses yang sama dalam sebuah peran kepemimpinan.

Kedua, penelitian oleh Himayatus Sholikhah, “Peran Perempuan Sebagai Pengambil Keputusan Dalam Keluarga Miskin (Studi Deskriptif Kualitatif Pada Perempuan Di Kelurahan Sewu Kecamatan Jebres Kota Surakarta)” dengan topik perempuan, pengambilan keputusan, keluarga, serta penyebab dan dampaknya dengan metode deskriptif kualitatif yang menerapkan unit analisis kelompok. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori Max Webber. Dimana dalam penelitian ini, menunjukkan bahwa peran perempuan sebagai pengambil

keputusan dalam keluarga banyak terjadi saat ini. Peran perempuan tidak hanya dalam sektor domestik tetapi juga merambah keranah publik. Selain itu, pola pengambilan keputusan dalam keluarga yang banyak digunakan oleh masyarakat kelurahan Sewu yaitu pola pengambilan keputusan yang didominasi oleh perempuan. Faktor penyebab perempuan melakukan pengambilan keputusan dalam keluarga adalah faktor internal dan eksternal.

Dengan itu dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang besar terhadap peran perempuan sebagai pengambil keputusan, khususnya pengaruhnya baik positif ataupun negatif terhadap peran perempuan sebagai pengambil keputusan.

Ketiga, penelitian oleh Dinda Meisy Puspitasari “Peran Anggota Legislatif Perempuan Di Kabupaten Banjarnegara Dalam Proses Pengambilan Keputusan Politik Masa Sidang 2019-2024 dengan topik anggota legislatif perempuan, peran dan kedudukan serta pengambilan keputusan yang menggunakan unit analisis kelompok dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori keputusan. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa peran anggota legislatif perempuan di kabupaten Banjarnegara pada periode 2019-2020 sudah cukup baik, dibuktikan dengan eksistensi mereka disetiap kegiatan dan organisasi baik dikantor ataupun diluar kantor. Hal tersebut didukung dengan tuntutan pencapaian anggota legislatif perempuan dalam pengambilan keputusan untuk menangani permasalahan di Kabupaten Banjarnegara, seperti tercapainya pembangunan lembaga kesejahteraan sosial (LKS) bagi anak sekolah.

Beberapa anggota legislatif perempuan pada periode 2019-2024 di kabupaten Banjarnegara memiliki latar belakang sebagai organisator yang mengikuti organisasi perempuan. Hal tersebut pada dasarnya dapat memberikan dampak positif dalam proses pengambilan keputusan, namun hanya saja masih kurang dalam kesinergitasan antara anggota legislatif perempuan lainnya. Sehingga perlu adanya kerja sama atau sinergi yang lebih intens dengan anggota legislatif perempuan agar meningkatkan perannya memperjuangkan masalah perempuan dan anak.

Keempat, penelitian oleh Desi Purnama Sari “Peran Politik Perempuan Dalam Pengambilan Keputusan Di Lembaga Legislatif Kabupaten Aceh Selatan

Tahun 2014-2019” dengan topik politik perempuan, dan pengambilan keputusan yang menggunakan metode penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori keputusan yang menerapkan unit analisis kelompok. Dimana dalam penelitian ini menunjukkan bahwa minimnya partisipasi perempuan dalam politik di Aceh Selatan terlihat dari sedikitnya jumlah perempuan yang menduduki jabatan publik, salah satunya adalah lembaga legislatif. Fakta ini menunjukkan bahwa eksistensi mereka dalam pengambilan keputusan di lembaga tersebut. Namun demikian, dengan semakin banyaknya perempuan berkiprah di dunia politik diharapkan ada lebih banyak ide dan gagasan dalam pembangunan daerah terutama yang berkaitan dengan kaum perempuan.

Dengan itu dapat memberikan wawasan terhadap masyarakat khususnya perempuan untuk lebih membuka pandangannya terhadap kaumnya sendiri agar kedudukan perempuan tidak terbelakangi. Tokoh tokoh perempuan yang kini berada dalam barisan elite, sudah saatnya segera memilih media yang paling canggih untuk melemparkan isu kesetaraan yang dituntutnya ketengah-tengah public seluas luasnya, agar perempuan perempuan yang kini masih terkurung dalam kotak kotak dan kelas sosial yang penuh kegelapan segera mendengar dan meresponnya.

Dalam penelitian ini, Peneliti dengan judul “Peran Perempuan Di Pemerintahan Desa Dalam Pengambilan Kebijakan (Studi Kasus Di Desa Cipang Kanan Rokan Hulu Tahun 2021), dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori pengambilan keputusan/kebijakan yang membahas tentang proses pengambilan keputusan/kebijakan. Penelitian ini menerapkan unit analisis kelompok. Dalam penelitian ini menunjukkan Menunjukkan Peran perempuan di BPD dalam pengambilan kebijakan sudah terilisasikan dengan sangat baik, dilihat dari dengan adanya kebijakan yang dilahirkan oleh keterwakilan perempuan dan didukung penuh oleh seluruh anggota kerja. Kebijakan yang dilahirkan sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di Desa Cipang Kanan.

Dengan itu terwujudnya peran perempuan dalam memegang peranan yang membawa dampak/ manfaat yang dilahirkan dan dirasakan oleh banyak orang

melalui kebijakan yang diciptakan serta kesetaraan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki laki. Dan diharapkan mampu menjadi barometer untuk setiap desa yang kurang akan partisipasi perempuan

Tabel 2.1

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang

No	Judul artikel	Topik/Kata Kunci	Penulis	Unit of Analysis	Findings	Methodology	Limmitations/Suggeste Future Research
1	Peran kepemimpinan dalam mengambil keputusan di Indonesia ¹¹	Peran perempuan, kepemimpinan, pengambilan keputusan	Hernita Sahban	Individu	Menunjukkan bahwa keterlibatan pemangku kepentingan perempuan dalam perumusan terbatas, hanya sedikit yang aktif dalam memperjuangkan kepentingan perempuan. Selain itu, beberapa pemangku kepentingan berkontribusi untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan.	Kualitatif	Terwujudnya peran wanita dalam berkesempatan memegang peranan sebagai kepemimpinan membawa dampak yang mengarah lebih baik bahwa permasalahan akan kesetaraan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki laki. Dengan demikian antara perempuan dan laki laki memiliki akses yang sama dalam sebuah peran kepemimpinan
2	Peran perempuan sebagai pengambil keputusan dalam	Perempuan, Pengambilan	Himayatus Sholikhah	Kelompok	Menunjukkan bahwa pola pengambilan keputusan di	Deskriptif- Kualitatif	Dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang besar terhadap

¹¹ *Hernita Sahban, Peran Perempuan Dalam Mengambil Keputusan Di Indonesia, April 2016*

	keluarga miskin (studi deskriptif kualitatif pada perempuan di kelurahan Sewu kecamatan Jebres kota Surakarta) ¹²	keputusan, Keluarga			masyarakat Desa Sewu, seringkali menonjolkan dominasi perempuan dalam pengambilan keputusan keluarga, yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal.		peran perempuan sebagai pengambil keputusan, khususnya pengaruhnya baik positif ataupun negatif terhadap peran perempuan sebagai pengambil keputusan.
3	Peran anggota legislatif perempuan di kabupaten Banjarnegara dalam proses pengambilan keputusan politik masa sidang 2019-2024 ¹³	Anggota legislatif perempuan, peran, kedudukan serta pengambilan keputusan.	Dinda Meisy Puspitasari	Kelompok	Menunjukkan bahwa keterlibatan dan efektivitas yang signifikan dalam berbagai kegiatan dan organisasi terlihat dalam fungsi legislasi termasuk proses pengambilan keputusan yang menangani permasalahan lokal.	Deskriptif- Kualitatif	Dapat perlu adanya kerja sama atau sinergi yang lebih intens dengan anggota legislatif perempuan agar meningkatkan perannya memperjuangkan permasalahan perempuan dan anak.
4	Peran politik perempuan dalam pengambilan	Politik perempuan dan pengambilan	Desi Purnama	Kelompok	Menunjukkan bahwa minimnya partisipasi	Kualitatif	Dapat memberikan wawasan terhadap masyarakat khususnya

¹² Himayatus Sholikhah, *Peran Perempuan Sebagai Pengambil Keputusan Dalam Keluarga Miskin*, 2016.

¹³ Dinda Meisy Puspitasari, *Peran Anggota Legislatif Perempuan Di Kabupaten Banjarnegara Dalam Proses Pengambilan Keputusan Politik*, 2021

	keputusan di lembaga legislative kabupaten Aceh Selatan tahun 2014- 2019 ¹⁴	keputusan.	Sari		perempuan dalam politik di Aceh Selatan terlihat dari sedikitnya jumlah perempuan yang menduduki jabatan politik, salah satunya adalah lembaga legislatif.		perempuan untuk lebih membuka pandangannya terhadap kaumnya sendiri agar kedudukan perempuan tidak terbelakangi.
5.	Peran perempuan di Badan Permusyawaratan Desa dalam pengambilan kebijakan (studi kasus di desa Cipang Kanan Rokan Hulu tahun 2021)	Kebijakan, keterwakilan perempuan, peran perempuan	Salwa Zahratih	Kelompok	Menunjukkan Peran perempuan di BPD dalam pengambilan kebijakan sudah terilisasikan dengan sangat baik, dilihat dari dengan adanya kebijakan yang dilahirkan oleh keterwakilan perempuan dan didukung penuh oleh seluruh anggota kerja. Kebijakan yang dilahirkan sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di Desa Cipang Kanan	Kualitatif	Terwujudnya peran perempuan dalam memegang peranan yang membawa dampak/ manfaat yang dilahirkan dan dirasakan oleh banyak orang melalui kebijakan yang diciptakan serta kesetaraan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki laki. Dan diharapkan mampu menjadi barometer untuk setiap desa yang kurang akan partisipasi perempuan.

¹⁴ Desi Purnama Sari, *Peran Politik Perempuan Dalam Pengambilan Keputusan Di Lembaga Legislatif Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2014-2019*, Juni 2017

Dengan beberapa penelitian terdahulu penulis tertarik menjadikan judul penelitian diatas sebagai bahan acuan untuk melanjutkan penelitian ini, Karena latar belakang penelitian diatas cukup identik dengan masalah yang sedang diteliti penulis, yaitu bagaimana peran perempuan dalam pengambilan Kebijakan. Objeknya sama sama pengambilan kebijakan. Persamaan dari beberapa penelitian diatas dengan penelitian ini merupakan sama sama menggunakan proses pengambilan kebijakan dalam melihat bagaimana peran perempuan di Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengambilan kebijakan di Desa Cipang Kanan Kabupaten Rokan Hulu.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, yang membedakannya adalah bagaimana proses pengambilan/pembuatan kebijakan, siapa saja aktor yang terlibat dalam perumusan kebijakan, bagaimana peran perempuan badan permusyawaratan desa serta lokasi dan waktu dalam penelitian serta dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori pengambilan keputusan oleh Harbany Pasolong.

2.2 Landasan teori

2.2.1 Kebijakan

Secara umum kebijakan atau policy dipergunakan untuk menunjukkan perilaku seseorang aktor misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun lembaga tertentu untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Pada dasarnya terdapat banyak penjelasan dengan batasan- batasan atau pengertian mengenai kebijakan.¹⁵ Berikut beberapa pengertian kebijakan menurut para ahli :

1. Menurut Noeng Muhadjir, kebijakan merupakan upaya memecahkan problem sosial bagi kepentingan masyarakat atas asas keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dan dalam kebijakan setidaknya harus memenuhi empat hal penting yakni;
 - a. Tingkat hidup masyarakat meningkat.
 - b. Terjadi keadilan : By the law, social justice, dan peluang prestasi dan kreasi individual.
 - c. Diberikan peluang aktif partisipasi masyarakat (dalam membahas masalah, perencanaan, keputusan dan implementasi).¹⁶
 - d. Terjaminnya pengembangan berkelanjutan.
2. Menurut Wehrich dan Koontz, bahwa kebijakan adalah alat membersihkan hati atau harapan yang mendorong, inisiatif tetap dalam keterbatasan. Kebebasan tergantung pada kebijakan dan sebaliknya akan mereflesikan posisi dan kekuasaan dalam organisasi. Kebijakan juga adalah rencana, kebijakan itu sebagai pernyataan atau pemahaman atau pengertian yang mengarahkan pikiran dalam membuat keputusan. Tidak semua kebijakan merupakan pernyataan, tetapi sering diimplikasikan dari tindakan menejer.¹⁷

¹⁵ Nuryahdi, Kebijakan, Universitas Tanjung Pura, Vol.3.no.1.2020

¹⁶ M.Syukri, dkk, *membangun sistem permasalahan dan menetapkan kebijakan, Pendidikan dan konseling vol.5 no.1,2023.*

¹⁷ Akib, *Evaluasi Kebijakan Sosialisasi Penerima Mahasiswa Baru Pascasarjana Iain Kendari, Shautut Tarbiyah, Vol 26 no ,Mei 2020.*

3. Menurut Mustopadidjaja: Kebijakan adalah keputusan suatu organisasi yang dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan tertentu, untuk melakukan kegiatan tertentu, atau untuk mencapai tujuan tertentu, yang dilakukan oleh instansi yang berkewenangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan.¹⁸

Berdasarkan pengertian kebijakan menurut para ahli, peneliti menyimpulkan kebijakan adalah petunjuk dan batasan secara umum yang menjadi arah dari tindakan yang dilakukan dan aturan yang harus diikuti oleh para pelaku dan pelaksana kebijakan karena sangat penting bagi pengolahan dalam sebuah organisasi serta mengambil keputusan atas perencanaan yang telah dibuat dan disepakati bersama.

Dengan demikian kebijakan menjadi sarana pemecahan masalah atas tindakan yang terjadi. Selain dari itu, kebijakan juga dapat diartikan sebagai rangkaian konsep dan azas yang menjadi garis besar dari dasar pada masalah yang menjadi rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan cara bertindak, pernyataan cita-cita, prinsip, atau maksud dalam memecahkan masalah sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran atau tujuan. Dengan kata lain sebagai pedoman untuk bertindak bagi pengambilan keputusan.

2.2.2 Teori Pengambilan Kebijakan atau Keputusan

Formulasi atau perumusan kebijakan merupakan salah satu tahap yang penting dalam pembentukan kebijakan publik, karena tanpa ada perumusan kebijakan maka kebijakan itu sendiri tidak akan mungkin ada. Pembentukan dan perumusan kebijakan sekilas merupakan konsep yang mirip, namun keduanya merupakan konsep yang berbeda meskipun keduanya tidak dapat dipisahkan secara tegas. Pembentukan kebijakan merupakan keseluruhan

¹⁸Zh Faozan, *Ilmu administrasi, implementasi kebijakan organisasi perangkat daerah, Politeknik STIA LAN, volume VII NO 3, Bandung, September 2010*

tahap dalam kebijakan publik yang berupa rangkaian keputusan.¹⁹

Setiap manusia pasti selalu mengambil keputusan baik untuk dirinya sendiri atau untuk kepentingan kelompok. Pengambilan keputusan tidak dapat dilakukan dengan ceroboh. Hal ini menyangkut soal kehidupannya sekarang, masa lalu, dan masa depan. Teori pengambilan keputusan merupakan ilmu yang menelaah mengenai cara memilih alternatif yang tepat untuk dijadikan sebagai sebuah keputusan. Biasanya berkaitan dengan perilaku seseorang dalam memutuskan sesuatu..

Menurut Harbany Pasolong, teori ini menyatakan bahwa seseorang memiliki keterbatasan pengetahuan dan bertindak hanya berdasarkan persepsinya terhadap situasi yang sedang dihadapinya. Hal ini disebabkan karena setiap orang memiliki pengetahuan yang berbeda. Sehingga, akan berpengaruh pada pengambilan keputusan yang tidak dapat dipisahkan dari berbagai konteks sosial berupa tekanan-tekanan dan pengaruh politik, ekonomi, dan sosial. Pengambilan keputusan juga dipengaruhi oleh beberapa faktor baik dari dalam diri ataupun faktor lingkungan.²⁰

Tahap- tahap pengambilan keputusan sebagai berikut:

1. Penemuan masalah

Tahap ini merupakan tahap dimana masalah harus didefinisikan dengan jelas, sehingga perbedaan antara masalah menjadi jelas.

2. Pemecahan masalah

Tahap ini merupakan tahap dimana masalah yang sudah ada atau sudah jelas kemudia diselesaikan dengan langkah langkah sebagai berikut:

- a. Identifikasi alternatif-alternatif keputusan untuk memecahkan masalah.
- b. Menganalisis faktor yang tidak dapat diketahui.
- c. Pembuatan alat (sarana) untuk mengevaluasi.
- d. Pemilihan dan penggunaan model pengambilan keputusan.

3. Pengambilan Keputusan

Keputusan yang diambil berdasarkan pada keadaan lingkungan atau

¹⁹ Siti malaiha dewi, *peran perempuan dalam formulasi kebijakan, IAIN kudu, 2016*

²⁰ Mulyono, *Teori pengambilan keputusan, of administrasi Negara, administrasi publik, Juni, 2009*

kondisi yang ada.²¹

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa teori pengambilan keputusan didefinisikan yaitu bagaimana memberi rujukan kepada orang atau organisasi dalam mengambil keputusan. Teori yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah teori pengambilan keputusan.

2.2.3 Peran Perempuan

1. Definisi Peran

Peran menurut terminologi adalah seperangkat tingkah yang yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Peran adalah aktifitas yang dijalankan seseorang atau suatu lembaga/organisasi yang biasanya diatur dalam suatu ketetapan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut. Peran (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Ketika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut telah menjalankan suatu peranan. Dapat disimpulkan, peran adalah deskripsi sosial tentang siapa kita. Peran menjadi bermakna ketika dikaitkan dengan orang lain, komunitas sosial atau politik. Peran merupakan kombinasi posisi dan pengaruh seseorang dalam melaksanakan hak dan kewajiban. Berikut pengertian peranan menurut para ahli:

1. Menurut soekanto, peran adalah aspek dinamis kedudukan (status)

Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan perannya. Antara kedudukan dan peranan keduanya tidak dapat dipisahkan. Peranan adalah tingkah laku yang diharapkan dari orang yang memiliki kedudukan atau status. Tidak ada peranan tanpa adanya kedudukan, peranan juga mempunyai arti demikian. Setiap orang memiliki macam – macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidup. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat dalam menjalankan suatu peranan. Peranan merupakan hal yang sangat penting bagi seseorang, karena dengan peranan

²¹ Harbany pasolong, *Teori pengambilan keputusan*, Alfabeta Bandung 2023, hlm 94

yang dimilikinya ia akan dapat mengatur perilaku dirinya dan orang lain. Seseorang dapat memainkan beberapa peranan sekaligus pada saat yang sama, seperti seorang perempuan dapat mempunyai peranan sebagai istri, ibu, karyawan kantor sekaligus. Peranan mencakup tiga hal, yaitu:

- a. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
 - b. Peran adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
 - c. Peran dikatakan sebagai perilaku yang penting bagi struktur sosial masyarakat.
2. Menurut Moeliono, menguraikan definisi peran sebagai berikut:
- a. Seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dimasyarakat.
 - b. Bagian dari tugas utama yang dilaksanakan
 - c. Proses cara perbuatan memahami perilaku yang diharapkan dan dikaitkan dengan kedudukan seseorang.²²
3. Menurut Biddle dan Thomas mengungkapkan bahwa peran adalah serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu. Teori Biddle dan Thomas tersebut melihat peran atau peranan seseorang dari harapan-harapan orang lain tentang perilaku yang pantas, norma, wujud perilaku, pemberian kesan positif atau negatif yang didasarkan pada harapan terhadap peran yang dimaksud. Thomas lebih komprehensif dalam melihat peran seseorang dalam posisi tertentu.²³

Berdasarkan pengertian peran menurut para ahli, peneliti menyimpulkan peran adalah sebuah aspek atau konsep yang dilakukan individu ataupun kelompok berdasarkan kedudukannya. Apabila seseorang individu maupun

²² Asriati, *Peran wanita dalam jabatan publik*, Uin Suska, Pekanbaru, 2011 hlm.13

²³ Alfonkimbal, dkk, *Ilmu pemerintahan, Peran Badan Kehormatan Dalam Penegakan Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Di Kabupaten SITARO vol.2, No.5 2020*

kelompok sudah melakukan hak dan kewajibannya bisa dikatakan sudah melakukan sebuah peran. Maka dapat disimpulkan bahwa peran adalah kedudukan seseorang atau kelompok untuk mengatur perilaku dirinya untuk mencaapai status tertentu.

2. Ruang Lingkup Peran perempuan

Pada umumnya masyarakat di Indonesia, pembagian kerja antara lelaki dan perempuan menggambarkan peran perempuan. Basis awal dari pembagian kerja menurut jenis kelamin ini tidak diragukan lagi terkait dengan perbedaan peran lelaki dan perempuan dalam fungsi reproduksi. Dalam masyarakat mempresentasikan peran yang ditampilkan oleh seorang perempuan. Analisis peran perempuan dapat dilakukan dari perspektif posisi mereka dalam berurusan dengan pekerjaan produktif tidak langsung (domestik) dan pekerjaan produktif langsung (publik), yaitu sebagai berikut:

1. Peran Tradisi

Menempatkan perempuan dalam fungsi reproduksi (mengurus rumah tangga, melahirkan dan mengasuh anak, serta mengayomi suami). Hidupnya 100% untuk keluarga. Pembagian kerja sangat jelas, yaitu perempuan di rumah dan lelaki di luar rumah.

2. Peran transisi

Mempolakan peran tradisi lebih utama dari peran yang lain. Pembagian tugas mengikuti aspirasi gender, tetapi eksistensi mempertahankan keharmonisan dan urusan rumah tangga tetap tanggung jawab perempuan.

3. Dwiperan

Memposisikan perempuan dalam kehidupan dua dunia, yaitu menempatkan peran domestik dan publik dalam posisi sama penting. Dukungan moral suami pemicu ketegaran atau sebaliknya keengganan suami akan memicu keresahan atau bahkan menimbulkan konflik terbuka

atau terpendam.

4. Peran egalitarian

Menyita waktu dan perhatian perempuan untuk kegiatan di luar. Dukungan moral dan tingkat kepedulian lelaki sangat hakiki untuk menghindari konflik kepentingan pemilahan dan pendistribusian peranan. Jika tidak, yang terjadi adalah masing-masing akan saling berargumentasi untuk mencari pembenaran atau menumbuhkan ketidaknyamanan suasana kehidupan berkeluarga.

5. Peran kontemporer

Adalah dampak pilihan perempuan untuk mandiri dalam kesendirian. Jumlahnya belum banyak, akan tetapi benturan demi benturan dari dominasi lelaki atas perempuan yang belum terlalu peduli pada kepentingan perempuan mungkin akan meningkatkan populasinya.²⁴

3. Karakteristik peran perempuan

a. Dalam keluarga

Keluarga adalah inti dari masyarakat, dengan kata lain keluarga adalah masyarakat yang terkecil yang terdiri dari Suami, Istri dan Anak. Keluarga yang baik akan menentukan bagaimana bangunan dari masyarakatnya. Keluarga yang baik tentunya dibangun oleh perempuan perempuan yang baik, kuat, tangguh, sabar dan adanya kerjasama yang harmonis antara Suami, Istri dan anak-anak.

Keluarga merupakan suatu lembaga sosial yang paling besar perannya bagi kesejahteraan sosial dan kelestarian anggota-anggotanya terutama anak-anaknya. Keluarga merupakan lingkungan sosial yang terpenting bagi perkembangan dan pembentukan pribadi anak. Keluarga merupakan wadah tempat bimbingan dan latihan anak sejak kehidupan mereka yang sangat muda. Dan diharapkan dari keluargalah seseorang dapat menempuh kehidupannya dengan masak. Peran dan tugas perempuan dalam keluarga secara garis besar dibagi menjadi 3, yaitu:

1. Peran perempuan sebagai ibu dalam keluarga
2. Peran perempuan sebagai istri

²⁴ *Academica fisip*, Peran perempuan, Universitas Tanjung Pura, vol.05. no.02, Oktober 2013

3. Peran perempuan sebagai anggota masyarakat.²⁵

b. Dalam masyarakat

Posisi dan kedudukan perempuan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara sudah sangat jelas yakni sebagai anggota masyarakat dan sebagai warga negara yakni memiliki sejumlah hak dan kewajiban. Tidak ada perbedaan antara perempuan dan laki laki.²⁶

c. Dalam pendidikan

Jumlah perempuan yang demikian besar merupakan aset dan problematika di bidang ketenagakerjaan. Dengan mengelola potensi perempuan melalui bidang pendidikan dan pelatihan maka tenaga kerja perempuan akan semakin menempati posisi yang lebih terhormat untuk mampu mengangkat derajat bangsa.

d. Dalam bidang ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi akan memacu pertumbuhan industry dan peningkatan pemenuhan kebutuhan dan kualitas hidup. Disektor ini perempuan dapat membantu peningkatan ekonomi keluarga melalui berbagai jalur baik kewirausahaan maupun sebagai tenaga kerja yang terdidik.

e. Dalam pelestarian lingkungan

Kerusakan lingkungan yang semakin parah karena proses industriliasasi maupun pembalakan liar perlu proses reboisasi dan perawatan lingkungan secara intensif. Dalam artian perempuan memiliki potensi yang besar untuk berperan serta dalam penataan dan pelestarian lingkungan.²⁷

f. Dalam politik

Perempuan Indonesia tidak lagi terkurung dalam kegelapan intelektual. Perempuan yang dulunya tidak diperkenankan sekolah hanya diperbolehkan membersihkan rumah, memasak,dll, kini dapat mencicipi akses pendidikan. Tugas dan tanggung jawab seorang perempuan bukanlah sekedar menjadi pelengkap isi rumah tangga. Namun harus bisa membicarakan arah kemajuan bangsa.

²⁵ Dewi Nurul Musjtari *Peran dan tugas perempuan dalam keluarga, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2018*

²⁶ Andi Anirah, *Peran strategis perempuan dalam masyarakat, vol 4 no 1, Juni 2014*

²⁷ *Ibid.*²⁷

Berbicara politik tidak hanya dilakukan oleh kalangan politisi, pemerintah atau para birokrat saja namun semua lapisan masyarakat.²⁸

Representasi perempuan dalam bidang politik dapat dikatakan masih jauh dari harapan. Di Indonesia sendiri perempuan yang terjun dalam dunia perpolitikan masih terbelenggu dengan laar belakang, budaya patriarki, perbedaan gender. Meskipun sampai saat ini selalu ada upaya untuk memperbaiki persoalan tersebut.

g. Dalam kepemimpinan

Kepemimpinan perempuan memiliki karakteristik sifat sifat khusus, yang mana sifat ini ,menjadi sumber kekuatan perempuan saat memegang peranan sebagai pemimpin. Diantaranya: partisipasi, pelimpahan dan pemberian wewenang, lebih memahami sesama perempuan, dan berpandangan jauh kedepan. Secara umum karakteristik gaya kepemimpinan terbagi menjadi dua, yaitu: kepemimpinan feminisme-maskulin dan gaya kepemimpinan tranformasional-transaksional.²⁹

Menurut peneliti, perempuan mampu berkiprah dalam segala aspek. Keberhasilan melakukan semuanya bukan merupakan hal yang mudah, yang penting adalah kemauan dan usaha untuk selalu belajar.

2.2.3 Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Penyelenggaraan pemerintahan desa dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada pemerintah desa adalah dilaksanakan oleh: Pertama, kepala desa atau yang disebut dengan nama lain, yang bertugas untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. kedua, dalam menjalankan roda pemerintahan desa dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.³⁰

Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa pada Tata Pemerintahan jelas diatur secara signifikan pada Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang

²⁸ Priadi Pasaribu, *Perempuan dan partisipasi politik*, Universitas Jambi, 2021

²⁹ Nur Rulifatur Rohmah, *Karakteristik kepemimpinan perempuan*, STAI Darussalam Krempeyang Ngajuk, 2021

³⁰ Sugiman, *Pemerintah desa*, Vol 7. No.1,2018 hlm.94

Desa yang mana secara hierarki peraturan perundangundangan berada dalam Peraturan Kabupaten dan kota, namun pada penyelenggaraan peraturan perundang-undangan, yang mana hal tersebut melalui proses Panjang pada perumusannya. Dalam peraturan perundang-undangan tersebut mengatur bahwa Badan Permusyawaratan Desa berada pada posisi legislative pada tatanan pemerintahan desa yang berfungsi untuk menjadi perumus, pengawas serta budgeting pada penyelenggaraan Desa.³¹

Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam bidang aspirasi masyarakat meliputi cara Badan Permusyawaratan Desa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Cara yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa dalam menampung aspirasi masyarakat adalah dengan cara membuka saran baik itu untuk pemerintah desamaupun untuk Badan Permusyawaratan Desa itu sendiri, serta masyarakat dapat menyalurkan aspirasinya dengan cara tertulis ataupun secara lisan pada saat ada pertemuan Badan Permusyawaratan Desa. Cara Badan Permusyawaratan Desa dalam menyalurkan aspirasi masyarakat adalah dengan menyampaikan dan membahas masalah bersama dengan pemerintahan desa pada pertemuan.³²

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa adalah peraturan hukum yang memiliki tujuan untuk mengatur tata cara pelaksanaan otonomi desa, memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang demokratis dan partisipatif, serta mendorong pembangunan desa yang berkelanjutan dan berkeadilan. Undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan menghadirkan fokus khusus pada peran serta desa dalam pembangunan nasional.³³

Dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2004 pasal 209 disebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa adalah sebutan nama Badan Perwakilan Desa. Dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2004 dijelaskan sebagai berikut:

³¹ Valery Imanuel Uway, *Fakultas Hukum UNSRAT, Lex Administratum Vol. 12 No.4. Mei 2024*

³² *Ibid.hlm.29*

³³ *Undang undang republik Indonesia nomor 16 tahun Tentang Desa*

1) Anggota Badan Permusyawaratan

Desa adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.

2) Pimpinan Badan Permusyawaratan

Desa dipilih dari dan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa.

3) Masa jabatan anggota Badan

Permusyawaratan Desa adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih lagi untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

4) Syarat dan tata cara penetapan anggota dan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa diatur dalam perda yang berpedoman pada peraturan pemerintahan sebagaimana yang tercantum di Undang-Undang Otonomi Daerah tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.³⁴

Adapun yang menjadi makna dasar dari tujuan dibentuknya Badan Permusyawaratan Desa adalah memperkuat pemerintah desa dalam melaksanakan rumah tangganya sendiri secara demokratis dan sesuai aspirasi masyarakat yang ada di desa itu sendiri. Adanya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berperan sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan desa pada dasarnya mempunyai kedudukan yang cukup penting dan strategis dalam menjembatani masyarakat dengan pemerintah desa terkait kebutuhan dan aspirasi yang ingin disampaikan. Terutama dalam hal pembangunan masyarakat desa itu sendiri.. Hal tersebut menjadi penting dalam menunjang pelaksanaan pembangunan desa. Badan Permusyawaratan Desa memiliki peran penting dalam pembangunan desa atas keterlibatannya. Akan tetapi, hal tersebut harus disesuaikan dengan kapasitas pemahaman yang baik mengenai peran, fungsi dan kewenangannya oleh anggota BPD.

2.2.5 Skema Pemikiran

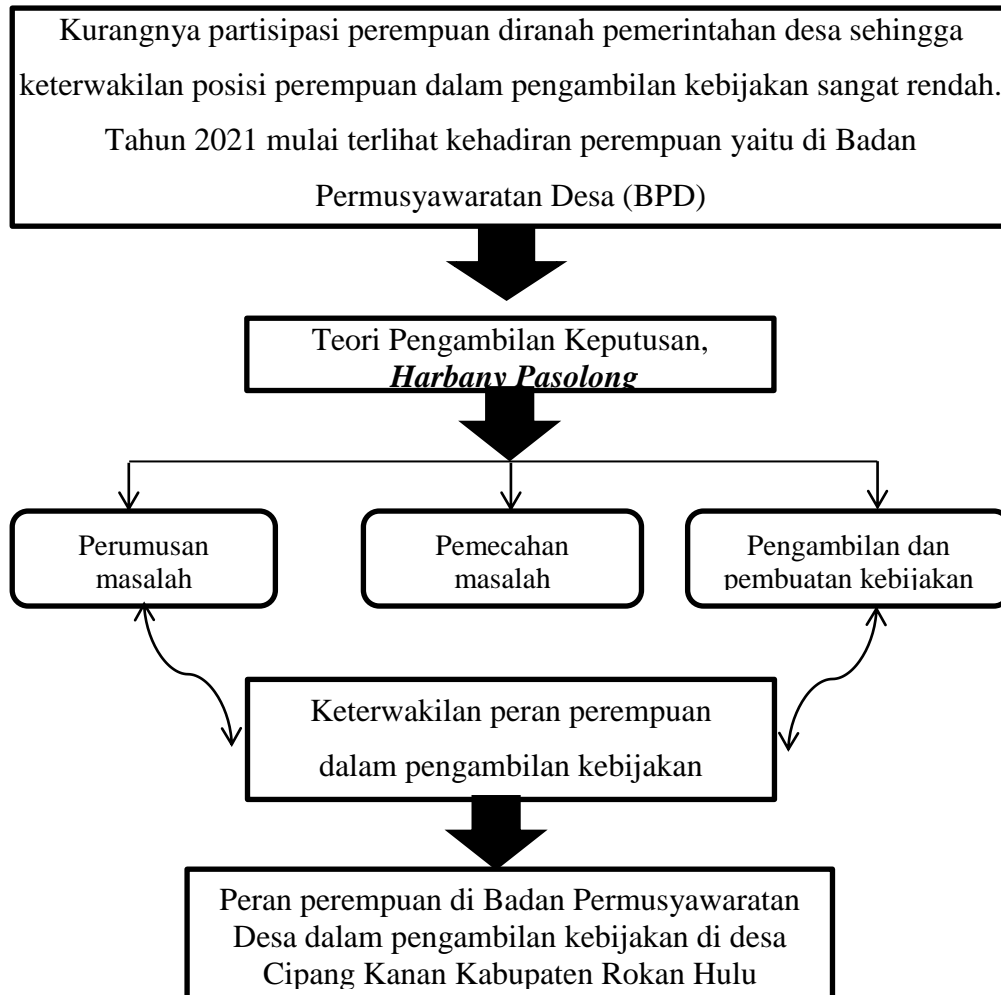
Skema pemikiran penelitian bertujuan untuk menentukan fokus dan

³⁴ *Dody Eko Wijayanto Jurnal Independent, kepala desa dengan badan permusyawaratan desa dalam pembentukan peraturan desa, Vol. 2 No. 1 hlm 43*

batasan terhadap apa yang akan diteliti. Skema pemikiran juga memperlihatkan bagaimana cara peneliti berpikir untuk mencapai hasil dari penelitian. Sesuai dengan fenomena yang peneliti teliti, yaitu di desa Cipang Kanan kurangnya partisipasi perempuan di ranah pemerintahan desa. Keterlibatan seorang perempuan dalam proses pengambilan kebijakan di pemerintahan desa rendah karena kurangnya partisipasi perempuan, selain itu juga mempengaruhi faktor peran perempuan dalam pemerintahan desa, dimana posisi yang dipegang di bangku pemerintahan sangat sedikit.

Berdasarkan fenomena yang telah peneliti paparkan diatas, penelitimencoba memaparkan skema pemikiran dari penelitian ini secara umum skemapemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Bagan 2.1
Skema Pemikiran Penelitian



Skema pemikiran digunakan untuk mempermudah memahami maksud dan tujuan dari penelitian yang akan diteliti. Sebagaimana yang dijelaskan dari skema penelitian diatas kurangnya partisipasi perempuan diranah pemerintahan desa sehingga keterwakilan posisi perempuan dalam pengambilan kebijakan sangat rendah. Tahun 2021 mulai terlihat kehadiran perempuan yaitu di Badan Permasyarakatan Desa (BPD) .

Sehingga peneliti ingin melihat bagaimana keterwakilan peran perempuan anggota BPD dalam pembuatan dan pengambilan kebijakan di desa Cipang Kanan Kabupaten Rokan Hulu. Dengan menggunakan teori pengambilan keputusan oleh

Harbany Pasolong yang menjelaskan tentang proses pengambilan keputusan untuk melihat sejauh mana peran perempuan anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam pengambilan kebijakan di Desa Cipang Kanan kabupaten Rokan Hulu.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan jenis penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti merupakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif studi kasus. Kirlk dan miller menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan terhadap manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasa dan peristilahannya.

Menurut Bogdan taylor menyatakan bahwa penelitian Kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati³⁵. Melalui penelitian kualitatif dapat mengenali subjek, merasakan apa yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari.

Adapun alasan peneliti menggunakan penelitian kualitatif karena dalam penelitian ini data yang dihasilkan berupa data deskriptif yang diperoleh data-data berupa tulisan, kata-kata dan dokumen berasal dari sumber atau informan yang diteliti dan dapat dipercaya. Kriteria data dalam penelitian kualitatif adalah data yang pasti. Data yang pasti adalah data yang sebenarnya terjadi sebagaimana adanya, bukan data yang sekedar terlihat, terucap, tetapi data yang mengandung makna di balik yang terlihat dan terucap tersebut. Contoh data yang pasti misalnya data orang menangis. Orang yang menangis itu harus dipastikan, apakah menangis karena susah atau justru menangis karena mendapat kebahagiaan. Untuk mendapatkan data yang pasti maka diperlukan berbagai sumber data dan berbagai teknik pengumpulan data.

³⁵ Akif Khilmiyah, *Metode Penelitian Kualitatif, Samudera Biru, Yogyakarta 2016*

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau wilayah untuk diadakan suatu penelitian. Lokasi penelitian ini dilakukan di desa Cipang Kanan, kecamatan Rokan IV koto, kabupaten Rokan Hulu, Riau. Dengan adanya gambaran dari lokasi penelitian akan memudahkan peneliti untuk melakukan penelitian.

Peneliti mengambil lokasi penelitian tersebut karena pada struktur pemerintahan di desa Cipang kanan kurangnya partisipasi keterlibatan perempuan di ranah parlemen pemerintahan serta peran keterwakilan perempuan dalam pengambilan kebijakan di pemerintahan desa Cipang Kanan, asumsinya banyak diisi oleh para lelaki saja di parlemen.

3.3 Peranan Penelitian

Di dalam penelitian ini penulis berperan sebagai instrument utama, alasannya bahwa segala sesuatunya belum mempunyai bentuk yang pasti, masalah, fokus penelitian, prosedur penelitian, hipotesis yang digunakan bahkan yang akan didapatkan belum bisa dipastikan. Peneliti bukanlah orang yang terlibat secara langsung dengan objek yang akan diteliti ataupun nonpartisipan. Dalam artian bahwa pada penelitian ini peneliti melakukan serangkaian tindakan terkait dengan upaya untuk mendapatkan data sesuai dengan objek yang akan teliti.

3.4 Teknik Pemilihan Informan

Informan penelitian adalah orang yang diwawancarai, diminta informasi oleh pewawancara. Sampel yaitu sebagian dari populasi yang diambil datanya dengan menggunakan cara-cara tertentu. Agar dapat memilih informasi yang dianggap mengetahui segala informasi dan masalah secara mendalam dan dapat dipercayakan sebagai sumber dalam mencari data yang diinginkan.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik purposive sampling. Teknik purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Teknik ini bertujuan untuk menentukan siapa saja informan yang akan peneliti teliti. Informan dalam penelitian ini adalah

orang yang benar benar tahu dan menguasai masalah, serta terlibat langsung dengan masalah penelitian. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, maka sangat erat kaitannya dengan faktor faktor kontekstual.

Berikut peneliti paparkan informan yang akan peneliti teliti untuk mendapatkan informasi dan data yang peneliti butuhkan:

Tabel 3.1 Informan Inti

No	Nama	Keterangan
1.	Trify Suhelni	Anggota Bpd perempuan
2.	Didit	Ketua BPD
2.	Waldi Rahmi, SE	Kepala desa
3.	Sannerya	Perangkat desa
4.	Jefri Yandi, SE	Perangkat desa
5.	Randa	Anggota Bpd
6.	Alex	Anggota Bpd

3.5 Unit Analisis

Unit analisis adalah satuan tertentu sebagai subjek penelitian. Unit analisis merupakan prosedur pengambilan individu yang di dalamnya mencakup sampling dan satuan kaji. Unit analisis mencakup beberapa jenis yaitu, 1) tingkat individu, analisis utama yang paling lazim dilakukan, unit analisis ditingkat individu dapat berupa melihat tindakan seseorang, persepsi, sikap, dan pendapat. 2) Kelompok, didefinisikan sebagai dua atau lebih individu yang berinteraksi. Unit analisis yang diterapkan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah kelompok, yaitu lembaga pemerintahan desa Cipang Kanan (anggota BPD dan Perangkat desa Cipang Kanan).

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan jenis penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian kualitatif dengan menggunakan metode purposive sampling, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. Wawancara (interview)

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung dari percakapan atau tanya jawab. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara dan yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan.³⁶

Adapun metode wawancara yang peneliti lakukan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur, dimana peneliti menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis. Dengan wawancara terstruktur ini setiap responden diberi pertanyaan yang sama, dan pengumpul data mencatatnya dan merekam suara. Pihak yang akan diwawancarai yaitu, perempuan perangkat desa Cipang Kanan, Perangkat desa Cipang kanan, Bpd (Badan Permusyawaratan Desa) Cipang Kanan, masyarakat desa Cipang kanan. Wawancara (interview) merupakan salah satu teknik pengumpulan informasi yang dilakukan dengan “Tanya jawab”, baik secara langsung maupun tidak langsung. Wawancara ini berpedoman kepada daftar pertanyaan yang sudah disiapkan oleh peneliti.

2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mengumpulkan dokumen dan data data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian lalu ditelaah secara intens, sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian.³⁷

³⁶ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT.Remaja Rosdakarya, Bandung 2016 hal.186.

³⁷ Djarn' Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung 2017 hal.149

3.7 Triangulasi Data

Triangulasi data adalah suatu cara mendapatkan data yang benar-benar absah dengan menggunakan pendekatan metode ganda. Triangulasi adalah Teknik pemeriksaan data dengan cara memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu sendiri, untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu. Trigualisasi yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber, triangulasi sumber yang dilakukan peneliti dengan mencari keabsahan informasi yang didapatkan kepada informan yaitu masyarakat desa Cipang Kanan.

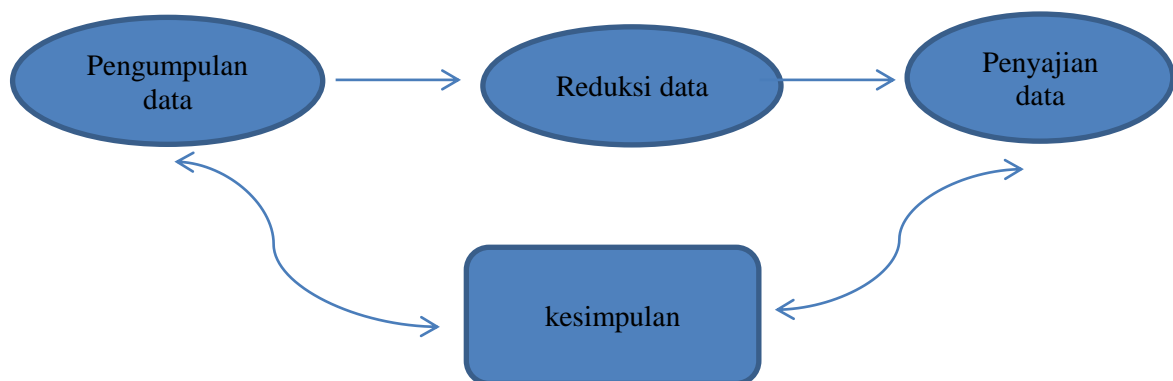
Tabel 3.2 Informan Triangulasi

No	Nama	Keterangan
	Muklis	Ketua kerapatan adat nagari
2.	Adrianto	Ketua Karang Taruna
3.	Nurtaiza	Kelompok Tani perempuan
4.	Tuti	Ketua PKK
5.	Erni	Wirid Yasin

3.8 Analisis Data

Teknik analisis data merupakan aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Didalam penelitian ini teknik pengolahan data yang digunakan adalah dengan teknik penelitian kualitatif, pengumpulan data dengan wawancara kepada informan yang telah peneliti tentukan, dan dari data yang didapatkan peneliti dapat mengambil kesimpulan tentang penelitian ini.

Bagan 3.1 Proses analisis data kualitatif



Bagan diatas memperlihatkan bagaimana pengumpulan data dengan analisis data, pengumpulan data merupakan bagian terpenting dalam kegiatan analisis data. Reduksi data merupakan upaya menyimpulkan data dan kemudian dipilah dengan kategori tertentu, hasil dari reduksi data diolah sedemikian rupa supaya mendapatkan hasil yang efisien.³⁸ Dalam penelitian ini peneliti akan berupaya menjawab dan menguraikan pengertian analisis data, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan bagaimana penarikan kesimpulan data yang diperoleh.

³⁸ Ahmad Rijani, *Proses analisis data penelitian kualitatif, Uin Antasari Banjarmasin, vol.17 no.33 Juni 2018*

3.9 Rancangan Struktur Penulisan

Dapatkan gambar detail dan lihat intinya dalam proposal tersebut, penulis membagi sistematika pembahasan menjadi 5 BAB yaitu:

a. BAB I, PENDAHULUAN

Pada bagian ini penulis menjelaskan rumusan masalah, masalah penelitian dan tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan penulisan sistem yang akan digunakan penulis dalam penelitiannya: “Peran Perempuan Di Pemerintahan Desa Dalam Pengambilan Kebijakan (Studi Kasus Di Desa Cipang Kanan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu, Riau tahun 2021.)

b. BAB II, KERANGKA TEORI

Pada bagian ini penulis memperkenalkan peran perempuan dalam teori pengambilan kebijakan atau keputusan. Konsep ini akan menjadi penulis gunakan itu sebagai alat analisis untuk menjelaskan hubungan dengan jelas teori/konsep dan pertanyaan penelitian.

c. BAB III, METODE PENELITIAN

Pada bagian ini menjelaskan metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini. Pendekatan dan desain penelitian, membahas lokasi penelitian, peran serta teknik yang diambil dalam penelitian. Bagian ini juga menjelaskan lokasi penelitian yang dijadikan wadah untuk melakukan penelitian ini. Selain itu, bagian ini juga menjelaskan tentang peranan penelitian, teknik pemilihan informan, yang mana informan dalam penelitian ini dipilih secara langsung oleh peneliti, unit analisis, teknik pengumpulan data, dalam teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini, yaitu berupa wawancara dan dokumentasi, triangulasi data, analisis data, serta menjelaskan tentang rancangan struktur penulisan.

d. BAB IV, DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

Pada bagian ini lebih mendeskripsikan secara detail lokasi penelitian yang akan dijadikan oleh peneliti sebagai fokus tempat penelitian.

e. BAB V, HASIL PENELITIAN

Pada bagian ini peneliti akan memaparkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti teliti terkait dengan bagaimana peran perempuan

dipemerintahan desa dalam pengambilan kebijakan (studi kasus di desa Cipang Kanan kabupaten Rokan Hulu tahun 2021), baik itu berupa hasil wawancara atau tinjauan pustaka yang dikaji secara mendalam menggunakan teori pengambilan keputusan/kebijakan.

f. BAB VI, PENUTUP

Pada bagian ini peneliti memaparkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan yang berisikan poin kesimpulan dan saran.

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI ATAU OBJEK PENELITIAN

4.1 Sejarah Desa Cipang Kanan

Dahulu sebelum dikenal sebagai desa Cipang Kanan, desa ini dikenal dengan nama Koto Melintang. Sejarahnya bermula dari kedatangan sekelompok orang dari Pagaruyung yang melakukan perjalanan dari Lubuk Sikaping, Pasaman, Sumatera Barat menuju daerah tersebut. Proses pemekaran dan perubahan nama desa ini setelah pertemuan dengan Raja Rokan dan rombongan yang dipimpin oleh Datuk Kalisati.

Awal mula berdirinya yaitu Dusun Kubang Buaya. Dusun ini salah satu dusun tertua di desa Cipang Kanan yang menjadi pusat aktivitas masyarakat. Nama ini berasal dari mitos lokal yang mengaitkan dengan kebedaraan buaya besar di sungai setempat. Selanjutnya perkembangan zaman lahirlah Dusun II Kersik Putih dan Dusun III Kampung Batas. Desa Cipang Kanan ini terdapat tiga dusun dan Dusun Kubang Buaya merupakan ibu desa Cipang Kanan sampai saat sekarang ini.

4.2 Letak dan pemerintahan Desa Cipang Kanan

Desa Cipang Kanan merupakan desa yang terletak di kecamatan Rokan IV Koto kabupaten Rokan Hulu. Letaknya yang cukup strategis karena berada pada lintas Sumatera bagian barat. Jaraknya ke ibu kota provinsi 168km, dan ibu kota kecamatan 65 km. Desa Cipang Kanan ini dipimpin oleh seorang kepala desa. Luas desa Cipang Kanan sebesar 17.749 km. Jumlah penduduk di desa Cipang Kanan adalah 1.114 jiwa. Dengan jarak Kantor desa ke Kecamatan adalah 49 km.

Dilihat dari benteng wialayah, Sebelah utara kecamatan Rokan IV Koto berbatasan dengan kecamatan Rambah dan Rambah Samo. Sebelah Timur berbatasan dengan kecamatan Tandun dan Kecamatan Ujung Batu. Sebelah Selatan berbatasan dengan XIII Koto Kampar dan sebelah barat berbatasan dengan kecamatan Mapat Tunggul, Pasaman, Sumatera Barat.

Dilihat dari potensi yang dimiliki oleh desa Cipang Kanan baik sumber daya manusia (SDM) maupun sumber daya alamnya (SDA) sangat potensial. Masyarakat desa Cipang Kanan pada umumnya bermata pencarian bertani karena didukung oleh lahan tanah yang subur yaitu sebagai petani karet dan sawit.

Gambar 4.1 Peta Lokasi Penelitian



Desa Cipang Kanan terdiri dari 3 Dusun yaitu: 1) Dusun I Kubang Buaya, 2) Dusun II Kersik Putih, 3) Dusun III Kampung Batas.

4.3 Keorganisasian

Organisasi merupakan suatu kelompok atau sekumpulan yang memiliki tujuan yang sama, di desa Cipang Kanan terdapat beberapa organisasi yaitu sebagai berikut:

1. Kerapatan Adat Nagari

Kerapatan adat nagari adalah lembaga pemufakatan adat tertinggi yang telah ada diwarisi secara turun temurun ditengah tengah Riau. Kerapatan adat nagari di Cipang Kanan diketuai oleh bapak Mukhlis.

2. Wirid Yasin

Wirid yasin merupakan kegiatan keagamaan yang secara umum dilakukan oleh ibu ibu berkelompok di Masjid atau langsung kerumah masyarakat sekitar.³⁹ Wirid Yasin di desa Cipang Kanan diketuai oleh

³⁹ Nazari Mahda, dkk, *Penaruh wirid yasin terhadap spritualitas kaum ibu di kecamatan Sawang,*

ibuk Erni.

3. Kelompok Tani

Kelompok Tani merupakan sekumpulan petani yang terikat dalam suatu kelompok diwilayah tertentu atas dasar keserasian dan kebutuhan bersama.⁴⁰. Kelompok tani Desa Cipang Kanan diketuai oleh ibuk Nurtaiza.

4. Kelompok Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

Kelompok pkk adalah gerakan pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah dengan wanita sebagai motor penggeraknya untuk membangun keluarga sebagai unit atau kelompok terkecil dalam masyarakat, menumbuhkan , menghimpun, mengarahkan, dan membina keluarga guna mewujudkan keluarga sejahtera. Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Di Desa Cipang Kanan diketuai oleh ibuk Tuti.

4.4 Pendidikan Desa Cipang Kanan

Dari segi pendidikan didukung oleh fasilitas yang cukup memadai yaitu, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berjumlah 3 buah, Prasekolah Taman Kanak-Kanak (Tk) berjumlah 3 buah, Sekolah Dasar (SD) berjumlah 3 buah, Serta satu bangunan Sekolah Menengah Pertama (SMP), Dan tempat ibadah terdiri dari 3 buah bangunan masjid dan 3 buah bangunan posyandu.

Vol, 1, No.1 Januari-Juni 2021, Hlm.90

⁴⁰ *Juita Lendo, Industri Kecil Kelompok Tani Cap-Tikus Masyarakat Desa Tokin Baru Kecamatan Motoling Timur Kabupaten Minahasa Selatan, Vol III. No.4 Tahun 2014, Hlm.1-3.*

BAB V

TEMUAN DATA DAN PEMBAHASAN

5.1 Temuan dan Hasil

Pada bab ini peneliti akan menyajikan dan menjelaskan informasi dan data data yang telah peneliti peroleh selama penelitian dilapangan berlangsung. Penelitian ini dilaksanakan Di Desa Cipang Kanan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu. Informasi dan data yang telah peneliti dapatkan berupa informasi melalui wawancara dengan informan penelitian. Data yang telah didapatkan melalui informan penelitian akan peneliti sajikan dalam bentuk kata kata, pendapat, dan argumentasi sehingga dapat menjelaskan topik yang telah peneliti angkat. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan peran perempuan di Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengambilan Kebijakan di Desa Cipang Kanan, Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu.

Tahun 2021 awal mulai munculnya keterwakilan perempuan pemerintahan desa Cipang Kanan di Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Trify Suhelny selaku perempuan yang sudah menjabat di BPD Cipang Kanan selama kurang lebih 3 tahun. Sebagai seorang perempuan ‘Trify Suhelny’ beranggapan bahwa perempuan tidak hanya dirumah saja, akan tetapi perempuan sangat boleh untuk berpartisipasi didunia pekerjaan. Awal mula motivasi trify Suhelny terbesit ketika menghadiri sebuah acara di desa Cipang Kanan yang diselenggarakan oleh pihak setempat yang melalukan sebuah program kerja seperti seminar yang membahas topik tentang perempuan. Dengan semangat dan niat yang kuat beliau mendiskusikan hal itu bersama keluarga. Selanjutnya, Trify Suhelny meminta izin kepada keluarga untuk mencoba bekerja di BPD Cipang Kanan. Dengan dukungan penuh dari keluarga, Trify Suhelny melamar untuk bekerja di BPD Cipang Kanan dengan mengikuti semua prosedur pendaftaran, persyaratan dan seleksi dalam pemilihan anggota BPD Cipang Kanan.

Proses seleksi yang ketat berlangsung, dalam pemilihan banyaknya para kandidat yang mendaftarkan diri. Tidak hanya perempuan saja tetapi juga diisi oleh banyak laki laki. Dengan niat dan tekad yang kuat, Trify Suhelni mengikuti semua prosedur sampai tahap seleksi dan kemenangan. Proses yang panjang untuk bisa menduduki jabatan sekarang, sangat menjadi sebuah penghargaan bagi Trify Suhelni karena terwujudnya cita cita beliau dan masyarakat Desa Cipang kanan untuk menciptakan keterlibatan perempuan di ranah pemerintahan desa. Selama ini sebelun beliau menjabat, kekosongan kursi untuk perempuan sangat terbukti dengan kesenjangan yang ada. Perempuan belum pernah dilibatkan untuk hadir dan memperoleh posisi yang sama untuk bekerja di ranah pemerintahan desa Cipang Kanan. Semua posisi diisi oleh laki laki sehingga belum terwujudnya keadilan gender.

Kurangnya partisipasi keterwakilan perempuan di pemerintahan Desa Cipang Kanan, karena adanya anggapan bahwa perempuan tidak bisa dilibatkan. Perempuan dianggap lemah dan tidak bisa diikuti sertakan. Laki laki lebih cenderung bisa dan cocok diposisi itu. Minimnya partisipasi perempuan dalam pemerintahan Desa Cipang Kanan, Kecamatan Rokan IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu mencerminkan masalah yang sangat harus diperhatikan lebih luas yang menghambat keterlibatan perempuan dalam pemerintahan daerah dalam proses pengambilan kebijakan/keputusan.

5.2 Proses Pengambilan Kebijakan/ Keputusan

Menurut Harbany Pasolong , Pengambilan keputusan merupakan proses pemilihan suatu alternatif untuk memastikan keberlangsungan organisasi. Dalam prosesnya, instansi harus mempertimbangkan faktor internal dan eksternal yang memengaruhi pengambilan keputusan. Faktor internal contohnya sumber daya yang diperlukan oleh instansi untuk pengambilan keputusan yang baik, sementara faktor eksternal meliputi situasi dan kondisi lingkungan diluar organisasi yang berdampak pada pengambilan keputusan. Peran perempuan di Badan Permusyawaratan Desa dalam pengambilan kebijakan sangatlah penting. Keterlibatan perempuan menunjukkan bahwa perempuan memiliki pemahaman

yang baik tentang kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, serta mampu merumuskan kebijakan yang inklusif.⁴¹

Pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara langsung dengan para informan yang terlibat dalam peran perempuan di Badan Permusyawaratan Desa dalam pengambilan kebijakan di desa Cipang Kanan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu dengan fokus pada tiga komponen pendukung teori Harbany Pasolong dalam proses pengambilan kebijakan yaitu: (1) perumusan masalah, (2) pemecahan masalah, (3) pengambilan dan pembuatan keputusan/kebijakan.

Dalam teori Harbany Pasolong, dalam proses pengambilan keputusan/kebijakan, tahapan proses yang dilakukan yaitu , *tahap pertama*, perumusan masalah. *Tahap kedua*, Pemecahan masalah. *Tahap ketiga*, pengambilan dan pembuatan keputusan/kebijakan. Proses ini merupakan proses yang digunakan untuk melihat keputusan/ kebijakan yang dilahirkan di Badan Permusyawaratan Desa Cipang Kanan.

Adapun hasil penelitian selama di lapangan yang berkaitan dengan peran perempuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengambilan kebijakan di desa Cipang Kanan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu. Disini peneliti akan melampirkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan informan yang bersangkutan sebagai berikut:

5.2.1 Tahapan Perumusan Masalah

Menurut Harbany Pasolong, perumusan masalah merupakan suatu hal yang sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari pelaksanaan atau implementasi suatu program atau kebijakan. Perumusan masalah merupakan tahap utama dalam mencapai satu tujuan. Perumusan masalah sangatlah penting dalam hal terlaksananya/tercapainya sebuah keputusan/kebijakan. Dalam perumusan masalah tentu adanya pihak yang tidak sejalan dengan kebijakan yang telah ditetapkan dan perlu adanya antisipasi terhadap kebijakan yang dipilih, oleh karena itu tahapan perumusan masalah merupakan tahap utama untuk

⁴¹ Harbany Pasolong, *Teory pengambilan keputusan*, Alfabeta Bandung 2023, hlm 77

menciptakan tujuan permasalahan sehingga nanti tercapainya pemikiran yang sama untuk meningkatkan kinerja dan melaksanakan kebijakan yang telah diputuskan secara bersama.

Perumusan masalah dapat dipandang sebagai suatu proses yang terdiri dari empat tahap: (1) Pencarian masalah, (2) pendefinisian masalah, (3) spesifikasi masalah, (4) pengenalan masalah. yang baik.⁴²

1. Pada tahap pencarian masalah, tahap awal ini melibatkan identifikasi dan pemahaman konteks masalah. Tahap ini memerlukan pengumpulan informasi yang relevan dan pengenalan perlunya keputusan. Pencarian masalah yang efektif sangatlah penting karena menjadi dasar bagi tahap berikutnya, yang mempengaruhi kualitas proses pengambilan kebijakan/keputusan.

Pada tahap ini, anggota BPD Cipang Kanan termasuk Trify Suhelny, melakukan identifikasi dan pemahaman konteks masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Proses ini melibatkan pengumpulan informasi yang relevan dari berbagai sumber. Pencarian masalah yang efektif sangat penting karena menjadi dasar bagi tahap berikutnya. Misalnya, dalam konteks Desa Cipang Kanan, pencarian masalah dapat mencakup identifikasi isu-isu seperti kurangnya pendapatan perempuan atau rendahnya partisipasi perempuan dalam pemerintahan. Dengan memahami konteks masalah secara mendalam, anggota BPD Cipang Kanan dapat merumuskan masalah dengan lebih tepat.

2. Pada tahap pendefinisian masalah, berbagai solusi potensial dihasilkan dan dievaluasi. Tahap ini melibatkan kreativitas dan pemikiran kritis untuk mengeksplorasi berbagai alternatif.

Setelah masalah teridentifikasi, tahap selanjutnya adalah pendefinisian masalah. Pada tahap ini, anggota BPD Cipang Kanan menghasilkan dan mengevaluasi berbagai solusi potensial. Proses ini melibatkan kreativitas dan pemikiran kritis untuk mengeksplorasi

⁴² *Ibid hal 44*

berbagai alternatif yang dapat diambil untuk mengatasi masalah yang telah diidentifikasi. Seperti, jika masalah yang dihadapi adalah kurangnya pendapatan perempuan, alternatif solusi yang mungkin diusulkan adalah program pelatihan keterampilan atau pemberdayaan ekonomi. Pendefinisian masalah yang baik akan membantu anggota BPD Cipang Kanan untuk memahami berbagai opsi yang tersedia dan memilih solusi yang paling sesuai.

3. Pada tahap spesifik masalah, tahap ini berfokus pada penyempurnaan definisi masalah, yang memastikan kejelasan. Tahap ini mengubah masalah yang lebih luas menjadi komponen yang dapat dikelola. Spesifikasi masalah yang ditetapkan dengan baik dapat meningkatkan kualitas keputusan secara signifikan dengan menyetarakan proses pengambilan keputusan.

Pada tahap ini, fokus beralih kepada penyempurnaan definisi masalah. Anggota BPD Cipang Kanan berusaha untuk memastikan kejelasan dalam perumusan masalah dengan mengubah masalah yang lebih luas menjadi komponen yang dapat dikelola. seperti, jika masalah yang dihadapi adalah "kurangnya partisipasi perempuan dalam pemerintahan," spesifikasi masalah dapat mencakup aspek-aspek seperti "kurangnya akses perempuan terhadap informasi tentang pemilihan" atau "stigma sosial yang menghalangi perempuan untuk berpartisipasi." Spesifikasi masalah yang ditetapkan dengan baik dapat meningkatkan kualitas keputusan secara signifikan dengan menyetarakan proses pengambilan keputusan.

4. Pada tahap pengenalan masalah, tahap akhir yang melibatkan pengakuan keberadaan masalah dan implikasinya. Pengakuan ini penting untuk memobilisasi sumber daya dan memulai tindakan. Pengenalan ini sering dipengaruhi asumsi yang dapat mempengaruhi bagaimana masalah dipersepsikan dan ditangani.

Pada tahap ini, anggota BPD Cipang Kanan mengakui keberadaan

masalah dan implikasinya bagi masyarakat. Pengakuan ini penting untuk memobilisasi sumber daya dan memulai tindakan. Misalnya, setelah mengidentifikasi dan mendefinisikan masalah, anggota BPD Cipang Kanan perlu mengkomunikasikan masalah tersebut kepada masyarakat dan pihak terkait lainnya untuk mendapatkan dukungan dan sumber daya yang diperlukan. Pengenalan ini sering dipengaruhi oleh asumsi yang dapat mempengaruhi bagaimana masalah dipersepsikan dan ditangani. Oleh karena itu, penting bagi anggota BPD Cipang Kanan untuk menyampaikan masalah dengan cara yang jelas dan meyakinkan agar dapat menarik perhatian dan dukungan dari masyarakat.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti paparkan dan jabarkan bagaimana proses dalam pengusulan program untuk melahirkan kebijakan di Badan Permusyawaratan Desa Cipang Kanan:

- Identifikasi Masalah

Trify Suhelny memulai perjuangannya dengan mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh perempuan di Desa Cipang Kanan, terutama terkait dengan pendapatan dan akses terhadap peluang ekonomi. Ia melakukan pengumpulan data melalui wawancara dan diskusi dengan masyarakat untuk memahami tantangan yang mereka hadapi.

Berdasarkan wawancara penulis bersama trify suhelny bahwa:

"saya menemukan bahwa banyak perempuan di desa yang kesulitan meningkatkan pendapatan mereka dan tidak memiliki akses terhadap informasi mengenai peluang kerja."

- Pengembangan Solusi

Setelah mengidentifikasi masalah, Trify mengusulkan program ekonomi berbasis pengolahan daun pandan duri sebagai solusi. Ia merancang program pelatihan keterampilan untuk perempuan agar mereka dapat memanfaatkan potensi lokal ini.

Berdasarkan wawancara bersama Trify Suhelny mengatakan bahwa:

"saya mengusulkan program pelatihan keterampilan mengolah daun pandan duri, yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan perempuan dan memberdayakan mereka secara ekonomi."

- Diskusi dan Perdebatan

Trify menyadari bahwa tidak semua anggota BPD sepakat dengan usulannya. Oleh karena itu, ia mengadakan pertemuan untuk mendiskusikan program tersebut. Dalam pertemuan ini, anggota BPD lainnya menyampaikan pendapat dan kekhawatiran mereka, yang menciptakan dinamika diskusi. Berdasarkan wawancara mengatakan bahwa:

"Dalam setiap pertemuan, kami berdiskusi secara terbuka. Tentu saja ada perbedaan pendapat, tetapi itu penting untuk mencapai kesepakatan yang lebih baik."

- Mencari Kesepakatan

Trify berusaha untuk mendengarkan semua pendapat dan mencari titik temu. Ia mengajak anggota BPD untuk bersama-sama mengevaluasi manfaat dan tantangan dari program yang diusulkan. Melalui musyawarah, mereka berusaha mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak.

Berdasarkan wawancara bersama anggota BPD Cipang Kanan mengatakan bahwa:

"Kami berusaha untuk menemukan solusi yang dapat diterima oleh semua anggota. Diskusi yang konstruktif membantu kami untuk merumuskan kebijakan yang lebih inklusif."

- Penyusunan Proposal Kebijakan

Setelah mencapai kesepakatan, Trify dan anggota BPD menyusun proposal kebijakan yang mencakup rincian program, tujuan, dan langkah-langkah implementasi. Proposal ini kemudian diajukan kepada pihak terkait untuk mendapatkan dukungan dan sumber daya yang diperlukan.

Berdasarkan wawancara bersama anggota BPD Cipang Kanan mengungkapkan bahwa:

"Setelah mendapatkan persetujuan dari anggota BPD, kami menyusun proposal resmi untuk program ini. Kami berharap ini dapat memberikan dampak positif bagi perempuan di desa."

- Implementasi dan Evaluasi

Setelah kebijakan disetujui, Trify berperan aktif dalam implementasi program. Ia memastikan bahwa pelatihan berjalan sesuai rencana dan melibatkan perempuan dalam setiap tahap pelaksanaan. Evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas program dan melakukan perbaikan jika diperlukan.

Berdasarkan wawancara penulis bersama ketua BPD menyatakan bahwa:

"Kami terus memantau dan mengevaluasi program yang telah dilaksanakan. Ini penting untuk memastikan bahwa program benar-benar memberikan manfaat bagi perempuan di desa."

Berikut peneliti jabarkan dokumentasi dalam perumusan kebijakan anggota BPD Cipang Kanan:





Proses penganyaman daun pandan duri oleh masyarakat desa cipang kanan

Perjuangan Trify Suhelny dalam melahirkan kebijakan ekonomi daun pandan duri mencerminkan komitmen dan dedikasinya untuk memberdayakan perempuan. Melalui proses identifikasi masalah, pengembangan solusi, diskusi, pencarian kesepakatan, penyusunan proposal, dan implementasi, ia berhasil menciptakan program yang dapat meningkatkan pendapatan dan kualitas hidup perempuan di Desa Cipang Kanan.

Dalam hal proses pengambilan keputusan/kebijakan yang dilahirkan perempuan di Badan Permusyawaratan Desa Cipang Kanan, Sebagaimana yang dimaksud oleh Harbany Pasolong yaitu, pada tahap pertama ini dimana pencarian masalah dengan benar. Merujuk dari hal tersebut maka dalam penelitian ini, tahapan pencarian masalah dilakukan dengan komunikasi antara sesama anggota BPD Cipang Kanan. Komunikasi dalam pencarian masalah menjadi hal yang berperan penting dalam tercapainya tujuan dalam pengambilan kebijakan/keputusan dan lancarnya proses pengambilan kebijakan/keputusan. Hal ini diperlukan agar pelaksanaan dan pengimplementasian berjalan efektif sesuai dengan tujuan keterwakilan peran perempuan dalam proses pengambilan kebijakan di Desa Cipang Kanan kecamatan Rokan IV Koto kabupaten Rokan Hulu.

Dari proses komunikasi yang dilakukan untuk pencarian masalah dalam pembentukan perencanaan kebijakan di Badan Permusyawaratan Desa Cipang Kanan. Berdasarkan wawancara dengan perempuan Badan Permusyawaratan Desa Cipang Kanan, Ibu Trify Suhelny selaku keterwakilan perempuan di Badan Permusyawaratan Desa Cipang Kanan bahwa:

“Pada setiap perumusan masalah yang dilakukan di BPD Cipang Kanan untuk melahirkan kebijakan, pada tahap awal kami seluruh anggota Bpd Cipang Kanan melakukan komunikasi bersama dalam pencarian masalah sehingga mencapai kesepakatan bersama. Semua keputusan yang direncanakan dilakukan dengan musyawarah diantara kami seperti berdiskusi bersama”⁴³

Hal senada juga disampaikan oleh bapak Didit selaku ketua Bpd Cipang Kanan dia menjelaskan :

“ Dalam setiap kegiatan baik itu dalam pembuatan kebijakan/keputusan, saya selaku ketua BPD Cipang Kanan selalu turut serta dalam perumusan masalah, mulai dari tahap pencarian masalah kemudian masalah itu diuraikan yang kemudian dilakukan analisis masalah(spesifi) dan tahap terakhir pengenalan masalah secara bersama seluruh anggota Bpd Cipang Kanan. Namun tidak dapat dipungkiri pasti

⁴³ Trify Suhelny, Cipang Kanan, 09 Desember 2024, Pukul 10.38 WIB, Wawancara

adanya dinamika perbedaan pendapat, akan tetapi semua kembali terhadap tujuan yang sama yaitu melahirkan suatu kebijakan yang efektif.”⁴⁴

Pada proses perumusan kebijakan di Badan Permusyawaratan Desa Cipang Kanan benar bahwasanya ketika perumusan masalah seluruh anggota Badan Permusyawaratan Desa melakukan musyawarah bersama dengan sistem mulai dari pencarian masalah, pemecahan masalah, spesifik masalah dan selanjutnya pengenalan masalah secara bersama tanpa membeda-bedakan antara laki laki ataupun perempuan. Semua saling bekerja sama untuk menghasilkan suatu keputusan/kebijakan yang efektif untuk dilahirkan di desa Cipang Kanan terutama di Badan Permusyawaratan Desa Cipang Kanan.

Hal itu juga dibenarkan oleh bapak Alex selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa Cipang Kanan menjelaskan lebih lanjut mengenai hal tersebut sebagai berikut:

“Saat rapat ataupun diskusi berlangsung yang selalu dilakukan di Bpd Cipang Kanan kami dari seluruh anggota perbidang berdiskusi dan merancang perumusan masalah sesuai prosedur kami di Bpd. Mulai dari pencarian masalah sehingga nantinya melahirkan keputusan bersama. Kebijakan yang dilahirkan juga nantinya akan bertujuan untuk kami dan masyarakat desa Cipang Kanan. Sehingga untuk mencapai atau melahirkan keputusan/kebijakan kami seluruh anggota lainnya berdiskusi tentang perumusan masalah tersebut sampai terciptanya tujuan kebijakan/keputusan tersebut.”⁴⁵

Menambah apa yang disampaikan oleh informan Alex dibenarkan juga oleh Bapak Randa selaku anggota Bpd Cipang Kanan menjelaskan bahwa:

“ Dalam perumusan masalah sangat pentingnya diskusi bersama. Hal seperti itu nantinya akan memicu tujuan bersama. Sehingga tidak adanya saling menyalahkan dan membeda bedakan karena dilakukan secara bersama. Kebijakan/keputusan yang baik semestinya diciptakan secara bersama sesuai prosedur yang ada di Bpd Cipang Kanan.Perbedaan dinamika pendapat tentunya ada dan secara

⁴⁴ Didit, Cipang Kanan. 13 Desember 2024, pukul 10.40 WIB, Wawancara

⁴⁵ Didit, Cipang Kanan. 13 Desember 2024, Pukul 14.00 WIB, Wawancara

bersama kami selaraskan”⁴⁶

Berdasarkan wawancara dengan keterwakilan perempuan, ketua BPD, dan anggota BPD menjelaskan bahwa dalam setiap perumusan masalah melakukan tahap tahap sesuai prosedur. Mulai dari pencarian masalah, pemecahan masalah, spesifik masalah dan pengenalan masalah sehingga nantinya tercipta suatu kebijakan/keputusan efektif secara bersama. Musyawarah dan komunikasi merupakan hal penting dilakukan di Badan Permusyawaratan Desa Cipang Kanan Kecamatan Rokan IV koto Kabupaten Rokan Hulu.

Berdasarkan data diatas peneliti simpulkan bahwa, proses pengambilan keputusan melalui tahap perumusan masalah didesa Cipang Kanan sangat terjaln mulus dan efektif dengan proses musyawarah dan komunikasi sesama anggota BPD sesuai prosedur untuk melahirkan keputusan bersama di Badan Permusyawaratan Desa Cipang Kanan.

5.2.2 Tahapan Pemecahan Masalah

Menurut Harbany Pasolong, Pada dasarnya pemecahan masalah adalah suatu proses observasi sebagai pengenalan serta usaha untuk mengurangi perbedaan antara dengan keadaan yang akan datang yang diharapkan . Pemecahan masalah mengusahakan memperkecil jurang pemisah kesenjangan yang ada. Agar permasalahan itu dapat diatasi secara efektif dan efisien, pimpinan harus mampu mengintegrasikan permasalahan yang dihadapinya dan mensikronisasikan ketatalaksanaannya.⁴⁷

Merujuk dari teori yang disampaikan oleh Harbany Pasolong mengenai pengambilan keputusan/kebijakan, Yaitu pada tahap selanjutnya pemecahan masalah. Tahap ini merupakan tahap dimana masalah yang sudah ada dan sudah jelas kemudian diselesaikan dengan langkah langkah sebagai berikut:

1) Identifikasi alternaif keputusan untuk memecahkan masalah.

Proses ini mencakup curah pendapat solusi potensial dan membangun

⁴⁶ Alex, *Cipang Kanan*, 15 Desember 2024, pukul 10.00 WIB, Wawancara

⁴⁷ *Ibid* hlm 45

representasi mental dari masalah, yang membantu dalam menghasilkan opsi yang komprehensif.

Sama halnya di Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Cipang Kanan, keterwakilan perempuan berperan aktif dalam tahap pemecahan masalah. Dalam identifikasi alternative keputusan, perempuan anggota BPD Cipang Kanan berkontribusi dengan mengemukakan berbagai solusi potensial yang mencerminkan. Kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Melalui diskusi yang melibatkan hasil pendapat, keterwakilan perempuan mampu membangun representasi mental yang komperenshif mengenai masalah yang dihadapi desa.

2) Menganalisis faktor faktor yang tidak dapat diketahui.

Pada tahap ini, pengambil keputusan harus mempertimbangkan ketidakpastian dan variable yang tidak diketahui dan dapat mempengaruhi keputusan. Dalam proses ini melibatkan evaluasi keterbatasan informasi yang tersedia dan mengenali sifat subjektif dari pengambilan keputusan yang dapat mempengaruhi pemilihan alternatif.

Sama halnya Perempuan di BPD Cipang Kanan menunjukkan kemampuan untuk mempertimbangkan ketidakpastian yang mungkin mempengaruhi keputusan. Mereka secara kritis mengevaluasi keterbatasan informasi yang ada dan menyadari sifat subjektif dari pengambilan keputusan, yang memungkinkan mereka untuk memberikan perspektif yang lebih luas dalam proses tersebut.

3) pembuatan alat (sarana) untuk mengevaluasi.

Penetapan kerangka kerja untuk mengevaluasi alternatif sangatlah penting. Infrastruktur ini mencakup kriteria untuk menilai kelayaan dan efektifitas setiap opsi, memastikan bahwa keputusan dibuat berdasarkan analisis struktur dan bukan hanya instusi.

Sama halnya di BPD Cipang Kanan pada tahap pembuatan alat untuk mengevaluasi, perempuan BPD Cipang Kanan berperan dalam menetapkan kriteria yang jelas untuk menilai kelayakan setiap alternatif yang diusulkan.

Hal ini untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya berdasarkan

pada intuisi tetapi juga pada analisis terstruktur.

4) pemilihan dan penggunaan model pengambilan keputusan.

Dalam pemilihan dan penggunaan, para pengambil keputusan memilih model yang tepat untuk menciptakan pilihan mereka. Secara sistematis yang ditetapkan sehingga proses pengambilan keputusan lebih terinformasi.

Di Badan Permusyawaratan Desa Cipang Kanan, perempuan anggota BPD memilih pendekatan yang sistematis untuk mengevaluasi. Sehingga nantinya proses pengambilan keputusan di Badan Permusyawaratan Desa Cipang Kanan menjadi lebih jelas dan mencerminkan kepentingan seluruh anggota masyarakat, salah satunya suara perempuan yang selalu terabaikan.

Pemecahan masalah sangatlah penting agar pengimplementasian suatu kebijakan/keputusan dapat berjalan baik dan efektif. Pemecahan masalah disini ialah tahap setelah perumusan masalah. Kemudian dalam pemecahan masalah, nantinya melahirkan pengambilan dan pembuatan suatu kebijakan/keputusan. Hal yang dimaksud adalah apakah kebijakan/keputusan dapat terelisasi dengan sangat baik atau tidak.

Sama halnya Pemecahan masalah dalam proses pengambilan dan pembuatan kebijakan/keputusan di desa Cipang Kanan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu. Seperti wawancara yang peneliti lakukan dengan ibu Trify Suhelny, selaku keterwakilan perempuan Bpd Cipang Kanan, Mengatakan bahwa:

“Dalam setiap tahap pemecahan masalah, saya selalu mengedepankan diskusi dan musyawarah. Kami harus memastikan bahwa setiap suara didengar dan dipertimbangkan, terutama suara perempuan yang sering kali terabaikan.”⁴⁸

Hal senada juga dijelaskan oleh ketua BPD Cipang Kanan sebagai berikut:

“Dalam proses pemecahan masalah, kami selalu mengedepankan musyawarah. Setiap anggota BPD, termasuk Trify, memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan ide-ide mereka. Ini

⁴⁸ Waldi Rahmi, Cipang Kanan, 09 Desember 2024, Pukul 11.00 WIB, Wawancara.

penting agar setiap keputusan yang diambil mencerminkan kebutuhan masyarakat”⁴⁹

Dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan informan Trify Suhelny dan Didit, untuk penyelesaian pemecahan masalah dilakukan dengan diskusi, komunikasi, musyawarah, secara bersama melalui forum komunikasi seluruh anggota yang terlibat dalam pembuatan kebijakan/keputusan. Dalam pemecahan masalah di Badan Permusyawaratan Desa Cipang Kanan, selingkup anggota melakukan prosedur mulai dari identifikasi masalah, analisis masalah, evaluasi, dan terakhir proses pengambilan keputusan. Keterlibatan aktif dalam musyawarah adalah kunci dalam proses pemecahan masalah di BPD Cipang Kanan. Baik Trify Suhelny maupun Didit menekankan pentingnya diskusi terbuka yang melibatkan semua anggota, termasuk perempuan, untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa kolaborasi dan partisipasi adalah elemen penting dalam pengambilan keputusan yang efektif.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat peneliti simpulkan bahwa dalam pemecahan masalah dalam pembuatan dan pengambilan kebijakan/keputusan di Badan Permusyawaratan Desa Cipang Kanan dilakukan secara terbuka dan efektif secara bersama tanpa membedakan antara rekan kerja laki laki maupun perempuan. Semua menjalankan tugas sesuai tupoksi masing masing dan ketika pemecahan masalah dilakukan sesuai prosedur mulai dari identifikasi masalah, analisis masalah, evaluasi, dan terakhir proses pengambilan keputusan secara bersama untuk melahirkan keputusan yang diterima secara bersama bertujuan untuk menjadikan desa Cipang Kanan berkembang yang progresif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses pengambilan keputusan di Desa Cipang Kanan perempuan berperan aktif dalam tahap pemecahan masalah.

5.2.3 Pengambilan dan pembuatan Keputusan/kebijakan

Menurut Harbany Pasolong tahapan yang terakhir adalah pengambilan

⁴⁹ *Didit, Cipang Kanan, 20 Desember 2024, Pukul 09.00, Wawancara*

dan pembuatan keputusan/kebijakan. Proses pengambilan keputusan yaitu sebagai berikut:

a. Memahami tanggung jawab kepemimpinan

Seseorang harus menyadari dan menempatkan diri sebagai pimpinan dalam organisasi dan bertanggung jawab sebagai pimpinan organisasi serta harus memutuskan sesuatu jika dalam organisasi tersebut timbul suatu masalah.

Di Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Cipang Kanan dalam memahami tanggung jawab kepemimpinan, perempuan anggota BPD menunjukkan kesadaran yang tinggi akan perannya sebagai pemimpi. Tidak hanya menyadari tanggung jawab dalam organisasi tetapi juga aktif dalam mengambil keputusan ketika muncul masalah yang sangat perlu diperhatikan.

b. Menganalisis masalah

Masalah yang dihadapi terlebih dahulu harus ditelaah, mengingat masalah itu memiliki macam macam sifat, bentuk, dan kompleksitasnya.

Dalam menganalisis masalah, perempuan BPD Cipang Kanan melakukan perhatian yang mendalam terhadap berbagai isu yang dihadapi oleh masyarakat di Desa Cipang Kanan. Memahami setiap masalah memiliki sifat dan bentuk yang berbeda sehingga sangat diperlukan pendekatan yang cermat untuk dapat dipecahkan secara efektif.

c. Proses pengambilan keputusan setelah menganalisis situasi

Menelaah keputusan yang harus dibuatnya, terutama yang ditelaah adalah alternatif- alternatif yang dilakukan dengan konsekuensi masing masing untuk kemudian dipilih satu diantara alternatif tersebut dianggap yang paling tepat.

Sama halnya di BPD Cipang Kanan stelah menganalisis situasi , proses pengambilan keputusan dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai alternatif yang ada. Perempuan anggota BPD Cipang Kanan terlibat aktif dalam menelaah setiap alternatif beserta konsekuensinya, sehingga dapat memilih opsi yang paling tepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa Cipang Kanan.

e. Implementasi Keputusan

Setelah keputusan diambil, maka keputusan itu kemudian dilaksanakan. Kemudian pelaksanaan keputusan itu akan saling terpengaruhi dari jiwa kepemimpinan dan manajemen dari pimpinan yang bersangkutan.⁵⁰

Dalam tahap implementasi keputusan, perempuan BPD Cipang Kanan berperan penting dalam memastikan bahwa keputusan yang telah diambil dilaksanakan dengan baik.

Proses pengambilan dan pembuatan kebijakan/keputusan merupakan faktor dan proses pemilihan suatu alternatif untuk memastikan keberlangsungan organisasi. Melalui tahap dan prosedur yang dilahirkan sehingga terciptanya suatu keputusan/kebijakan yang tersusun sesuai rencana secara efektif. Dari hal itu, dalam proses pembuatan kebijakan dan keputusan tak terlepas dari semua pihak, baik ketua dan seluruh anggota Badan Permusyawaratan Desa juga semua pihak perangkat desa Cipang Kanan. Seperti yang dijelaskan oleh bapak Waldi Rahmi S.E selaku kepala desa Cipang Kanan mengatakan bahwa:

“Dalam hal perumusan kebijakan, kegiatan yang dilaksanakan tak lepas dari prosedur prosedur yang telah ditetapkan di desa Cipang Kanan. saya selaku pemimpin juga memantau setiap kegiatan yang dilakukan. Mulai dari tanggung jawab sebagai pimpinan, analisis masalah, bagaimana proses pengambilan keputusan di desa, serta bagaimana pengimplementasian kebijaka tersebut. pembuatan kebijakan/keputusan partisipasi perempuan, serta dapat dilihat dari program program yang sudah ada dilahirkan didesa Cipang Kanan.”⁵¹

Dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan informan Waldi Rahmi S.E, selaku kepala desa Cipang Kanan, mengatakan bahwa proses pembuatan kebijakan/keputusan berjalan sesuai prosedur yang sudah ditetapkan. Selain itu, setiap kegiatan dan program yang diciptakan dipemerintahan desa Cipang Kanan dibawah naungan dan pantauan beliau selaku kepala desa Cipang Kanan.

Hal ini dibenarkan oleh Bapak Didit selaku ketua pimpinan Badan

⁵⁰ Harbany Pasolong, *Teori pengambilan Keputusan*, Alfabeta Bandung 2023 hlm 86

⁵¹ Waldi Rahmi, 5 Januari 2025, Cipang Kanan, Pukul 08.00 Wib, Wawancara

Permusyawaratan Desa Cipang Kanan:

“Dalam pengambilan dan pembuatan kebijakan/keputusan saya selaku ketua BPD Cipang Kanan selalu berkoordinasi dengan kepala desa Cipang Kanan, baik dari program kerja yang direncanakan, permasalahan kami di Bpd ataupun hal lainnya. Dalam pembuatan kebijakan/keputusan pemerintahan desa Cipang Kanan selalu menjalankan sesuai prosedur. Kebijakan kebijakan yang lahir merupakan hasil kesepakatan kami bersama. Perempuan ataupun laki laki semua sama bekerja sesuai tupoksi masing masing.”⁵²

Berdasarkan yang disampaikan oleh bapak Didit selaku ketua BPD Cipang Kanan, bahwasanya dalam proses pengambilan dan pembuatan kebijakan/keputusan berdasarkan prosedur. Dalam setiap menjalankan program ataupun hal lainnya selalu berkoordinasi bersama kepala desa. Dipemerintahan desa Cipang Kanan semua menjalankan tugas dan tupoksi masing masing tanpa ada perlakuan pembeda antara laki laki dan perempuan.

Berdasarkan wawancara diatas bahwa peranan perangkat desa sangatlah penting dalam pengambilan dan pembuatan kebijakan/keputusan. Hal senada dijelaskan kepala desa sebagai berikut:

“ Dipemerintahan desa Cipang Kanan ini, semua unit kegiatan baik di instansi pemerintahan desa ataupun selingkup Badan Permusyawaratan Desa Cipang Kanan, dalam menyekapati suatu hal terutama tentang perumusan kebijakan dan lain sebagainya, kami melakukan sesuai ketentuan yang berlaku di desa Cipang Kanan ini. Sedikitnya partisipasi perempuan bukan menjadi perlakuan pembeda bagi kami. Semua anggota sama dan memiliki tujuan yang sama sehingga nantinya melahirkan suatu kebijakan yang inklusif dan berkemajuan di Desa Cipang Kanan.”

Hal senada juga dibenarkan oleh informan Jefri Yandi S.E, selaku perangkat desa Cipang Kanan:

“Pasca perumusan kebijakan, saya turut ikut serta dan hadir dalam rapat desa bersama seluruh perangkat desa Cipang Kanan dan BPD. Bahwa dalam perumusan kebijakan untuk melahirkan kebijakan/keputusan tersebut diiringi dengan kesepakatan bersama tanpa menindas golongan keterwakilan perempuan untuk menyuarkan hak dia sebagai keterwakilan perempuan di Desa

⁵² Didit, Cipang Kanan, 06 Januari 2025, Pukul 09.00 Wib, Wawancara

Cipang Kanan.”

Berdasarkan apa yang disampaikan oleh Jefri Yandi S.E, bahwasanya untuk menyepakati keputusan secara bersama. Serta suara keterwakilan perempuan sangat didengarkan tanpa adanya perlakuan berbeda, begitu juga halnya di Badan Permusyawaratan Desa Cipang Kanan. Peran anggota perempuan berjalan sangat efektif. Hal ini terlihat melalui program program yang sudah diciptakan dan tercapainya tujuan masyarakat desa Cipang Kanan melalui aspirasi suara perempuan yang sudah disampaikan.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa di instansi pemerintahan desa Cipang Kanan, dalam proses pengambilan dan pembuatan keputusan/kebijakan sangat terbuka dan efektif berdasarkan prosedur atau tahapan. Peran perempuan sangat penting terutama dalam ide dan gagasan yang melahirkan kebijakan/keputusan yang efektif. Hal ini terlihat dari pertemuan peretemuan ketika rapat. Selain itu, adanya program baru yang disuarakan masyarakat kepada keterwakilan perempuan, kemudian disampaikan didalam pertemuan. Semua prosedur berjalan dan terelisasi dengan baik, dapat dilihat dari kerja sama antara kepala desa dan ketua Badan Permusyawaratan desa Cipang Kanan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam proses pengambilan dan pembuatan keputusan di BPD Cipang Kanan perempuan memainkan peran yang signifikan.

5.3 Keterwakilan Peran Perempuan Dalam Pengambilan Kebijakan

Keterlibatan awal perempuan dalam tata kelola desa Cipang Kanan mencerminkan pergeseran bertahap namun signifikan menuju representasi politik lokal. Sejak tahun 2021, partisipasi perempuan ditandai dengan keterwakilan di Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang sangat penting untuk pengambilan kebijakan/keputusan bagi masyarakat. Keterlibatan ini dibentuk dari berbagai faktor, termasuk kerangka hukum dan upaya keterlibatan masyarakat.

Keterwakilan perempuan dalam BPD diamanatkan untuk melibatkan

perempuan, dengan peraturan yang menyarankan setidaknya ada satu keterwakilan perempuan. Di desa Cipang Kanan kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu, Perempuan mulai menduduki peran dalam BPD. Sebelumnya keterwakilan perempuan belum ada sama sekali. Karena selalu ada stigma bahwa perempuan tidak bisa berpartisipasi di instansi pemerintahan desa. Sesuai perkembangan zaman kini peran keterwakilan perempuan di pemerintahan desa sudah mulai muncul walau hanya sedikit.

Trify Suhelny, sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Cipang Kanan, menunjukkan komitmen yang kuat dalam memperjuangkan kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat, terutama perempuan. Proses perjuangan ini melibatkan beberapa tahapan yang kompleks

Trify Suhelny, sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Cipang Kanan, memulai perjuangannya dengan melakukan identifikasi masalah yang dihadapi oleh masyarakat, khususnya perempuan. Melalui interaksi langsung dengan masyarakat, Trify mendengarkan keluhan dan aspirasi mereka. Ia menemukan bahwa banyak perempuan di desa mengalami kesulitan dalam meningkatkan pendapatan mereka dan merasa terpinggirkan dalam proses pengambilan keputusan.

Untuk memperkuat pemahamannya tentang masalah yang ada, Trify mengadakan forum diskusi dengan perempuan di desa. Dalam forum ini, ia mengumpulkan data dan informasi mengenai kebutuhan mereka, serta mendiskusikan berbagai tantangan yang mereka hadapi. Hasil dari forum ini menunjukkan bahwa perempuan sangat membutuhkan pelatihan keterampilan yang dapat membantu mereka menghasilkan produk yang bisa dijual.

Berdasarkan hasil identifikasi dan pengumpulan data, Trify mulai merumuskan program yang relevan. Ia mengusulkan program pelatihan keterampilan menganyam daun pandan duri sebagai solusi untuk meningkatkan pendapatan perempuan. Program ini dirancang untuk memberdayakan perempuan dan memberikan mereka keterampilan yang dapat digunakan untuk menciptakan produk yang bernilai ekonomi.

Sebelum mengajukan program secara resmi, Trify melakukan musyawarah dengan anggota BPD lainnya dan perangkat desa. Dalam diskusi ini, ia mempresentasikan ide programnya dan meminta masukan dari anggota lain. Proses musyawarah ini penting untuk mendapatkan dukungan dan memastikan bahwa program yang diusulkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Setelah mendapatkan persetujuan dari anggota BPD dan perangkat desa, Trify menyusun proposal resmi untuk program pelatihan keterampilan. Proposal ini mencakup tujuan, manfaat, dan rencana pelaksanaan program. Dalam rapat resmi BPD, Trify mempresentasikan proposal tersebut dan menjelaskan pentingnya program ini bagi pemberdayaan perempuan di desa.

Proposal yang diajukan oleh Trify mendapatkan dukungan dari anggota BPD dan kepala desa. Setelah disetujui, Trify berperan aktif dalam proses implementasi program. Ia memastikan bahwa pelatihan berjalan sesuai rencana dan melibatkan perempuan dalam setiap tahap pelaksanaan.

Berdasarkan pemaparan di atas peneliti melakukan wawancara bersama pihak yang terlibat dalam posisi keterwakilan peran perempuan Di Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengambilan Kebijakan di Desa Cipang Kanan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu tahun 2021 yaitu Ibu Trify Suhelni selaku keterwakilan perempuan BPD Cipang Kanan, mengatakan bahwa:

“Selama masa jabatan saya, kebijakan yang saya lahirkan dalam memperjuangkan suara perempuan di Desa Cipang Kanan dengan adanya berbagai program seperti pertumbuhan ekonomi, program desa sehat, program dakwah perempuan. Saya merasa penting untuk mendengarkan langsung suara perempuan di desa kita. Banyak dari mereka yang merasa terpinggirkan dan kesulitan dalam meningkatkan pendapatan. Melalui dialog, saya ingin memastikan bahwa aspirasi mereka didengar dan diperhatikan. Program ini sudah mulai terelisasi dengan baik di desa Cipang Kanan”⁵³

Berdasarkan apa yang disampaikan oleh informan di atas, bahwa semenjak

⁵³ Trify Suhelny, Cipang Kanan, 09 Desember 2024. Pukul 10.39 WIB, wawancara

kehadirannya di BPD Cipang Kanan sudah melahirkan kebijakan yang didukung penuh oleh anggota lainnya. Perempuan memainkan peran yang signifikan di pemerintahan desa cipang kanan.

Penjelasan yang telah dipaparkan oleh informan Trify Suhelny dibenarkan oleh informan Didit selaku ketua Badan Permusyawaratan Desa Cipang Kanan bahwa:

“Saya sangat mendukung inisiatif Trify Suhelny dalam mengusulkan program pelatihan keterampilan. Program ini tidak hanya akan memberdayakan perempuan, tetapi juga memberikan dampak positif bagi perekonomian desa secara keseluruhan. Dalam setiap proses pengambilan keputusan, kami selalu mengedepankan musyawarah. Setelah program dilaksanakan, kami akan melakukan evaluasi untuk melihat dampaknya. Kami ingin memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.”⁵⁴

Selaras dengan yang diungkapkan oleh ibu Erni selaku ketua wirid yasin perempuan masyarakat desa Cipang Kanan, mengatakan bahwa:

“Saya sangat mendukung program yang diusulkan oleh Trify. Kegiatan pelatihan ini tidak hanya akan meningkatkan keterampilan perempuan, tetapi juga memperkuat solidaritas di antara mereka. Ini adalah langkah positif untuk kemajuan desa.”⁵⁵

Hal senada diungkapkan oleh ibu Tuti selaku ketua PKK desa Cipang Kanan mengungkapkan bahwa:

“Program yang diusulkan Trify sangat bermanfaat bagi kami. Kami berharap agar program ini dapat terus berlanjut dan memberikan dampak yang lebih besar bagi perempuan di desa Cipang Kanan”⁵⁶

Menambah apa yang disampaikan Ibu Tuti dibenarkan juga oleh ibu Nurtaiza selaku ketua kelompok tani perempuan bahwa:

“Keterlibatan Trify dalam BPD dan usulan programnya

⁵⁴ Didit dan Walhi Rahmi, Cipang Kanan, 09 Desember 2024, Pukul 11.00 WIB, Wawancara

⁵⁵ Erni., Cipang Kanan, 09 Desember 2024, Pukul 09.30 WIB, Wawancara

⁵⁶ Tuti, Cipang Kanan, 03 Januari 2025, pukul 12.00 WIB, Wawancara

menunjukkan bahwa perempuan memiliki suara yang penting dalam pembangunan desa. Kami berharap lebih banyak program seperti ini yang dapat membantu perempuan dalam meningkatkan kesejahteraan”⁵⁷

Berdasarkan apa yang disampaikan oleh 3 anggota masyarakat desa Cipang Kanan, disambut dan dibenarkan oleh bapak Muklis selaku Ketua kerapatan adat bahwa:

“Kebijakan yang diusulkan oleh Trify Suhelny sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat. Saya melihat bahwa program pelatihan keterampilan ini dapat memberikan peluang bagi perempuan untuk berkontribusi lebih dalam perekonomian desa.”⁵⁸

Hal senada juga dibenarkan oleh bapak Adrianto selaku ketua pemuda Cipang Kanan menjelaskan bahwa:

“program kebijakan yang bisa dimanfaatkan oleh perempuan desa cipang kanan sangat bagus, akan tetapi lebih bagus jika program juga diciptakan untuk kami para anggota pemuda cipang Kanan. Sehingga program yang dijalankan tidak hanya sebatas diperempuan saja.”⁵⁹

Dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa Perjuangan Trify Suhelny dalam memperjuangkan kebijakan di Desa Cipang Kanan menunjukkan bahwa proses pengambilan keputusan tidaklah instan. Melalui berbagai tahapan yang kompleks, Trify berhasil melahirkan kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat di instansi pemerintahan desa Cipang Kanan, semenjak adanya posisi keterwakilan perempuan beberapa kemajuan sudah terlihat dan dapat dirasakan oleh masyarakat desa Cipang Kanan yaitu dengan adanya program program yang sudah dilahirkan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat setempat. Berikut peneliti paparkan kebijakan pro perempuan sebagai berikut:

⁵⁷ Nurtaiza, Cipang Kanan, 03 Januari 2025, pukul 11.00 WIB, Wawancara

⁵⁸ Muklis dan Adrianto, Cipang Kanan, 14 Desember 2024, Pukul 16.00 WIB, Wawancara

⁵⁹ Adrianto, Cipang Kanan, 08 Januari 2025, pukul 10.00 WIB, Wawancara.

Tabel 5.1
Kebijakan Pro Perempuan Desa Cipang Kanan

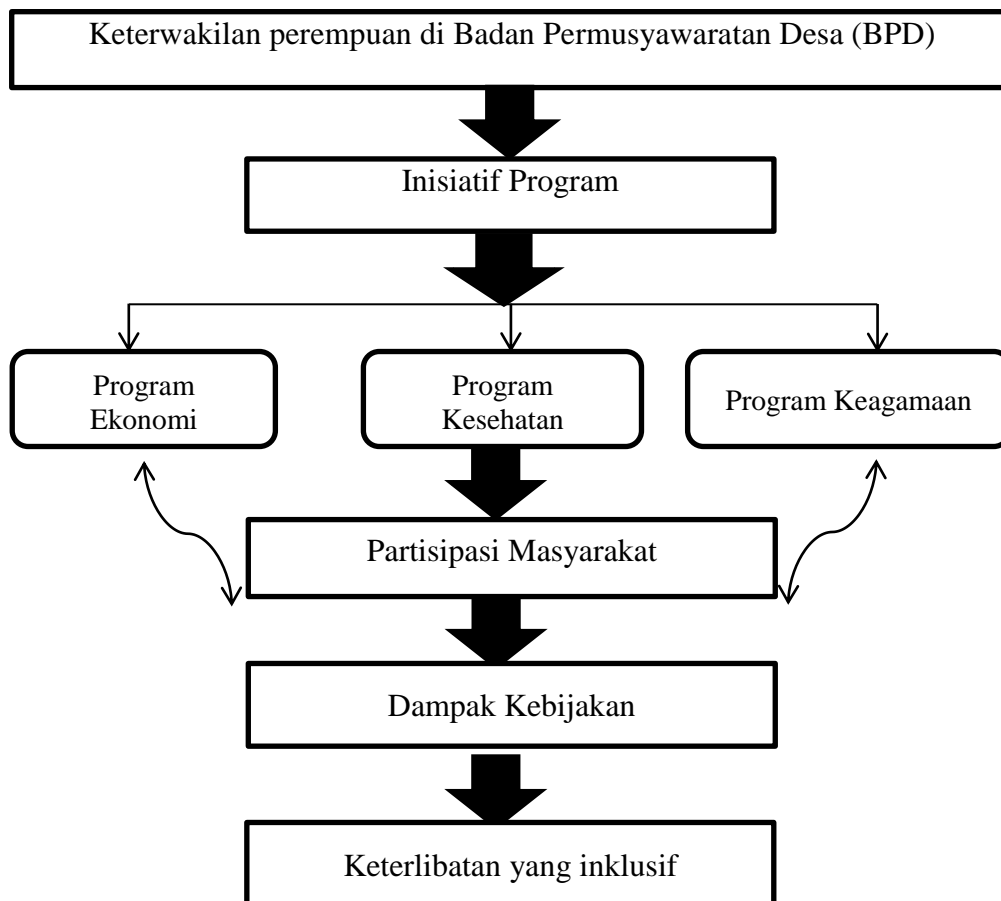
No	Nama Kebijakan	Spesifikasi Kebijakan	Tujuan
1.	Program Pertumbuhan Ekonomi	Kegiatan menganyam daun pandan duri untuk menghasilkan produk yang dapat dijual.	Meningkatkan pendapatan perempuan, terutama bagi yang paruh baya dan tidak memiliki suami.
2.	Program Senam Sehat	Kegiatan senam sehat untuk meningkatkan kesehatan fisik perempuan.	Meningkatkan kesehatan dan kebugaran perempuan di desa.
3.	Program Peningkatan Gizi	Program edukasi tentang gizi dan kesehatan untuk ibu hamil dan menyusui.	Meningkatkan pengetahuan tentang gizi dan kesehatan ibu dan anak.
4.	Program Majelis Dakwah	Kegiatan dakwah dan pengajian untuk perempuan.	Meningkatkan pengetahuan agama dan spiritualitas perempuan.

Penjelasan yang dipaparkan oleh informan penelitian diatas tentang tahapan proses pembuatan/pengambilan kebijakan yang dimaksud Harbany Pasolong. Peneliti menangkap bahwa pemaparan informan tersebut tidak terlepas dari keterlibatan informan dalam pengambilan kebijakan di Badan Permusyawaratan Desa Cipang Kanan tahun 2021.

Dari pernyataan diatas, bahwa peran perempuan di desa sangatlah penting. Dengan kehadiran perempuan bisa menjadi wadah untuk menyampaikan aspirasi. Desa Cipang Kanan merupakan pemerintahan yang tidak memandang bulu antara peran perempuan dan peran laki laki. Semua dilakukan secara bersama dan musyawarah adalah hal yang sangat perlu dan selalu penting untuk dilakukan. Terbukti dengan adanya dampak positif yang dilahirkan dan dirasakan oleh masyarakat desa Cipang Kanan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti paparkan diatas, peneliti mencoba memaparkan skema pemikiran dari hasil penelitian ini secara umum. Skema pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Bagan 5.1
keterlibatan Perempuan dalam Pengambilan Kebijakan
di Desa Cipang Kanan.



Sebagaimana yang dijelaskan dari skema penelitian diatas Keterlibatan perempuan dalam pengambilan kebijakan di Desa Cipang Kanan menunjukkan kemajuan yang signifikan. Dengan adanya posisi BPD, perempuan dapat menyuarakan aspirasi dan mempengaruhi kebijakan yang berdampak langsung pada masyarakat. Program program yang dihasilkan tidak hanya bermanfaat bagi perempuan, tetapi juga untuk seluruh masyarakat, menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan partisipatif.

Berdasarkan penjelasan data diatas dapat disimpulkan bahwa Peran perempuan di Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengambilan dan

pembuatan kebijakan di desa Cipang Kanan kecamatan Rokan IV Koto kabupaten Rokan Hulu sudah terelisasi dengan baik dan suara perempuan di Badan Pemerintahan Desa Cipang Kanan didengar dengan adanya kebijakan kebijakan melalui program program baru yang dilahirkan di desa Cipang Kanan kecamatan Rokan IV Koto, Rokan Hulu tahun 2021.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Penelitian ini memiliki fokus kajian pada proses pengambilan keputusan/kebijakan di badan permusyawaratan desa Cipang Kanan tahun 2021. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif studi kasus. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori Harbany Pasolong untuk dijadikan patokan dalam proses pengambilan keputusan/kebijakan. Tahapan pengambilan keputusan/kebijakan menurut Harbany Pasolong yaitu, Perumusan masalah, pemecahan masalah, sehingga melahirkan pengambilan dan pembuatan keputusan/kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran perempuan di Badan Permasyarakatan Desa dalam pengambilan kebijakan di desa Cipang Kanan Rokan Hulu tahun 2021, dapat ditarik kesimpulan:

1. Pengambilan keputusan/kebijakan yang dilakukan di pemerintahan desa Badan Permasyarakatan Desa Cipang Kanan, kecamatan Rokan IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu merupakan dengan teori yang digunakan oleh Harbany Pasolong yaitu mulai dari perumusan masalah, pemecahan masalah melalui musyawarah sehingga nantinya menghasilkan sebuah keputusan/kebijakan secara hasil bersama.
2. Peran Perempuan dalam Pengambilan Kebijakan: Keterlibatan perempuan, khususnya Trify Suhelny sebagai anggota BPD, menunjukkan bahwa perempuan memiliki peran yang signifikan dalam proses pengambilan keputusan. Melalui partisipasi aktif, perempuan dapat menyampaikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat, serta berkontribusi dalam merumuskan kebijakan yang relevan dan bermanfaat.
3. Proses Pengambilan Kebijakan: Proses lahirnya kebijakan di BPD Cipang Kanan mengikuti tahapan yang sistematis, yaitu perumusan masalah, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, implementasi kebijakan, dan evaluasi. Setiap tahapan melibatkan diskusi dan musyawarah antara

anggota BPD, yang mencerminkan prinsip demokrasi dan partisipasi masyarakat

4. Kebijakan yang dihasilkan, seperti program penganyaman daun pandan duri, program kesehatan, dan program keagamaan telah memberikan dampak positif bagi masyarakat, terutama bagi perempuan. Program-program ini tidak hanya meningkatkan pendapatan perempuan, tetapi juga memperkuat peran mereka dalam pembangunan desa.

5. Meskipun terdapat kemajuan dalam keterlibatan perempuan di pemerintahan desa, masih ada tantangan yang harus dihadapi, seperti stigma sosial yang menganggap perempuan tidak mampu berpartisipasi secara aktif. Oleh karena itu, perlu adanya upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran dan dukungan terhadap peran perempuan dalam pemerintahan.

6. Penelitian ini merekomendasikan agar BPD Cipang Kanan terus mendorong keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan dan merumuskan kebijakan yang lebih inklusif. Selain itu, perlu dilakukan program-program pelatihan dan pemberdayaan yang dapat meningkatkan kapasitas perempuan dalam berpartisipasi di ranah publik

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian diatas tentang peran perempuan di Badan Permusyawaratan Desa dalam pengambilan kebijakan di desa Cipang Kanan Rokan Hulu Tahun 2021, Adapun saran yang peneliti ajukan sebagai berikut:

1. Kajian mengenai Peran perempuan dalam pengambilan kebijakan sudah ada diteliti sebelumnya dan dijadikan rujukan. Namun terkait peran perempuan di BPD dalam pengambilan kebijakan di desa Cpang Kanan dengan menggunakan teori Harbany Pasolong masih belum ada ditemui. Peneliti berharap agar kajian dan penelitian tentang peran perempuan di BPD dalam pengambilan kebijakan dari teori harbany pasolong kiranya dapat diperbanyak.

2. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi suatu barometer untuk setiap desa yang kurangnya partisipasi perempuan dalam pemerintahan desa serta proses pengambilan keputusan/kebijakan di desa
3. Agar BPD Cipang Kanan terus mendorong dan memfasilitasi keterlibatan perempuan dalam setiap proses pengambilan keputusan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan forum diskusi yang melibatkan perempuan dari berbagai latar belakang, sehingga suara mereka dapat didengar dan diakomodasi dalam kebijakan yang dihasilkan.
4. Perlu diadakan program-program pemberdayaan yang lebih terstruktur dan berkelanjutan untuk perempuan di desa. Program ini dapat mencakup pelatihan keterampilan, pendidikan kewirausahaan, dan peningkatan kapasitas dalam bidang kepemimpinan. Dengan demikian, perempuan akan lebih siap untuk berpartisipasi aktif dalam pemerintahan dan pengambilan keputusan
5. Agar BPD melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan yang dihasilkan, terutama yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan. Hal ini penting untuk menilai dampak kebijakan dan melakukan perbaikan jika diperlukan, sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Darma Aliah Yoce, Pemahaman Politik Gender, 19 Januari 2023
- Khilmiyah Akif, Metode Penelitian Kualitatif, Yogyakarta:Samudera Biru,2016
- Moleong J Lexy, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung:PT.Remaja Rosdakarya, 2016 hal.186
- Mulyono, Teori pengambilan keputusan,of administrasi Negara, administrasi publik, Juni,2009
- Pasolong Harbany, Teori Teori Pengambilan Keputusan, Alfabeta Bandung 2023
- Pasolong Harbany, Faktor Faktor Pengambilan Keputusan, Alfabeta Bandung 2023
- Pasolong Harbany, Proses Pengambilan Keputusan, Alfabeta Bandung 2023
- Pasolong Harbany, Kepemimpinan Birokrasi, Alfabeta Bandung 2022
- Pasolong Harbany, Etika Profesi, Alfabeta Bandung 2021
- Satori Djam',dkk, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung:Alfabeta, 2017

B. WEBSITE

- Kemenko PMK, Partisipasi politik perempuan bagi kemajuan bangsa,15 April 2021,<https://www.kemenkopmk.go.id/partisipasi-politik-perempuan-di-indonesia-penting-bagi-kemajuan-bangsa>
- Manunggaljaya, Partisipasi Perempuan dalam Pengambilan Keputusan Desa,25 Mei 2024, <https://manunggaljaya-tenggarongseberang.desa.id/info-keuangan/infografis-realisisi-apbdes/realisasi-2022/>
- Musjtari Nurul Dewi, Peran dan tugas perempuan dalam keluarga, Universitas Muhammadiyah, Yogyakarta, <https://repository.umy.ac.id/handle/123456789/3700>
- Pasaribu Priadi, Perempuan dan partisipasi politik, Universitas Jambi, 2021, <https://www.unja.ac.id/perempuan-dan-partisipasi-politik/>
- Penu Yulia, Kesetaraan gender dalam budaya patriarki terhadap kaum perempuan pada ranah publik ,universitas timor, 2023,

[file:///C:/Users/ACER/Downloads/49a63684acd2d03b891519e3e61a6ac3%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/ACER/Downloads/49a63684acd2d03b891519e3e61a6ac3%20(1).pdf)

Undang undang republik Indonesia nomor 16 tahun Tentang Desa ,
<https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2014/6TAHUN2014UU.htm>

Webdesaku Mekarjaya, Kiarapedes, Pemerintahan desa Mekarjaya, Peran pemerintah desa dalam mensejahterakan masyarakat, 1 maret 2023,
<https://mekarjaya-purwakarta.desa.id/read/30496>

C. SKRIPSI

Asriati, Peran wanita dalam jabatan publik ,2011

Firdausa Mada Berliana, Peran Anggota Legislatif Perempuan Dalam Pembuatan Kebijakan Keluarga Di DPRD Kabupaten Semarang Periode 2019-2024

Puspitasari Meisy Dinda, Peran Anggota Legislatif Perempuan Di Kabupaten Banjarnegara Dalam Proses Pengambilan Keputusan Politik,2021

Sahban Hernita, Peran perempuan dalam mengambil keputusan di Indonesia, April 2016

Sari Purnama Desi, Peran Politik Perempuan Dalam Pengambilan Keputusan Di lembaga legislative kabupaten Aceh Selatan tahun 2014-2019, Mei 2018

Sholikhah Himayatus, Peran Perempuan Sebagai Pengambil Keputusan Dalam Keluarga Miskin, 2014

D. JURNAL

Academica fisip, Peran perempuan, Universitas Tanjung Pura, Vol.05. No.02, Oktober 2013

Administrasi Pemerintahan Daerah, volume XI, Desember, 2013

Akib, Evaluasi Kebijakan Sosialisasi Penerima Mahasiswa Baru Pascasarjana Iain Kendari, Shautut Tarbiyah, Vol 26 nomor 1, Mei 2020

Alfonkimbal, dkk, Ilmu pemerintahan, Peran Badan Kehormatan Dalam Penegakan Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Di Kabupaten SITARO vol.2, No.5 2020

- Anirah Andi, Peran strategis perempuan dalam masyarakat, Vol 4 No 1, Juni 2014
- Ilmu administrasi, implementasi kebijakan organisasi perangkat daerah, volume VII NO 3, September 2010
- Jivani Audia, perlindungan perempuan dan anak, peran pembuatan kepala daerah dalam pembuatan kebijakan responsive gender, Universitas Kristen Indonesia, vol.01, no.1 Jakarta 2024
- Kusuma Nila, Riset Sosiologi Progresif Aktual, keterlibatan perempuan desa dalam pembangunan, universitas matarram, Vol 05, No 1 juni 2023
- Lendo Juita, Industri Kecil Kelompok Tani Cap-Tikus Masyarakat Desa Tokin Baru Kecamatan Motoling Timur Kabupaten Minahasa Selatan, Vol III, No.4 Tahun 2021
- Mahda Nazari, dkk, pengaruh wirid yasin terhadap spritualitas kaum ibu ibu dikecamatan Sawang, Vol,1,No.1 Januari-Juni 2021,Hlm.90
- Melisa Ita, pemerintahan, Peran dan fungsi BPD, universitas Amikom Yogyakarta Warta Governare, Vol.2, No.1 Januari-Juni 2021 hlm 244.
- Nadir Sakinah, Otonomi Daerah dan desentralisasi desa menuju pemberdayaan masyarakat desa, Vol, 1 ,2013.
- Nuryahdi, Kebijakan, Universitas Tanjung Pura, Vol.03, No.01,2020
- Rijani Ahmad, Proses analisis data penelitian kualitatif, Uin Antasari Banjarmasin, vol.17 no.33 Juni 2018
- Rohmah Rulifatur Nur, Studi Pendidikan dan Hukum Islam, Karakteristik kepemimpinan perempuan, STAI Darussalam Krempyang Ngajuk, Vol.7, No.2, Juli 2021
- Sugiman, Pemerintah desa, Vol 7. No.1,2018 hlm.94
- Syukri Muhammad, dkk, membangun sistem permasalahan dan menetapkan kebijakan, Pendidikan dan konseling vol.5 No.1,2023.
- Uway Imanuel dkk, Lex Administratum, Hukum Unsrat, Vol.12, No.4, Mei 2024
- Wijayanto Eko Dodi, independent, kepala desa dengan badan permusyawaratan desa dalam pembentukan peraturan desa, Vol.2 No.1 hlm.43.

Lampiran:

LAMPIRAN DOKUMENTASI



Wawancara bersama ibu Trify Suhelny, beliau merupakan keterwakilan perempuan yang bekerja di BPD Cipang Kanan



Wawancara bersama bapak Didit, beliau merupakan ketua BPD Cipang Kanan



Wawancara bersama bapak Waldi Rahmi S.E. beliau merupakan kepala desa Cipang Kanan.



Wawancara bersama perangkat desa Cipang kanan.



Wawancara bersama Bapak Muklis dan Bapak Adrianto, mereka merupakan Ketua keadatan nagari dan ketua pemuda desa Cipang Kanan.



Wawancara bersama informan Erni, Nurtaiza, Tuti, dan Rika, Mereka merupakan ketua kelompok tani perempuan, ketua wirid yasin, ketua pkk dan selaku masyarakat desa Cipang Kanan.



Wawancara bersama anggota Bpd Cipang Kanan.



Nomor : 202/IL.3.AU/F/2024
Lamp : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Padang, 24 Jumadil Awal 1446 H
26 November 2024 M

Kepada Yth,
Bapak/Ibu Kepala Desa Cipang Kanan
Kabupaten Rokan Hulu
di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Seiring salam di atas, kami doakan semoga kita semua dalam keadaan sehat dan sukses dalam menjalankan aktifitas sehari-hari. *Aaminyarabbal'alamiin.*

Kami dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak/Ibu untuk dapat kiranya menerima mahasiswa kami berikut ini:

Nama : Salwa Zahratih
NIM : 21100008
Prodi : Ilmu Politik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Untuk melakukan penelitian di instansi Bapak/Ibu Pimpin, guna untuk penyusunan Skripsi mahasiswa dengan judul: Peran Perempuan di Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengambilan Kebijakan (studi kasus di Desa Cipang Kanan Rokan Hulu Tahun 2021)

Oleh sebab itu kami harapkan Bapak/Ibu untuk dapat membantu mahasiswa yang dimaksud.

Demikianlah permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang Bapak/Ibu berikan kepada mahasiswa kami, diucapkan terima kasih.

Wabillahirrahmatil Walhidayah.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Dekan,

Dr. Syaflin Halim, M.A.
NIDN. 1026048305



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Kampus 1 : Jln. Pasir Kandang No. 4 Kota Tengah, Padang
Telp (0751) 4851002, Fax (0751) 482274

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Nomor : 033/KEP/IL3.AU/F/2023

Tentang

PENUNJUKAN/PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI ILMU POLITIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, setelah

Menimbang

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Buku Panduan Akademik FISIPOL UMSB mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, diperkenankan untuk mengikuti Pembimbing Skripsi,
- Bahwa Mahasiswa FISIPOL UMSB tersebut di bawah ini telah memenuhi syarat untuk mengikuti Pembimbing Skripsi,
- Berdasarkan sub a dan b di atas perlu ditunjuk/diangkat Pembimbing Skripsi dimaksud dengan keputusan dekan,

Mengingat

- Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia,
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi,
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi,
- Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 178/13/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 02/PED/LO/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah,
- Statuta Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Tahun 2020,
- Buku Panduan Akademik Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat,
- Buku Panduan Akademik FISIPOL 2019/2020,
- Peraturan Akademik FISIPOL UM SUMBAR Tahun 2022/2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:
Pertama

Menunjuk/mengangkat staf pengajar tersebut di bawah ini:

No.	Nama Dosen	Jabatan
1.	Lara Indah Yandri S.IP, M.IP	Pembimbing 1
2.	Duli Rahmadi, S.Sos,MA	Pembimbing 2

Penyusunan/Perulisan Skripsi Mahasiswa FISIPOL UMSB, di bawah ini:

Nama	Satwa Zahruth
NIM	21100008
Prodi	Ilmu Politik
Judul	Peran Perempuan di Pemerintahan Desa dalam Pengambilan Kebijakan (Studi Kasus di Desa Cijinang Kanai Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023)

Kedua

Diharapkan kepada Dosen Pembimbing Skripsi dapat melakukan bimbingan dan pembinaan dalam menyusun/perulisan skripsi mahasiswa ini dengan sebaik-baiknya kepada program studi/pimpinan fakultas.

Ketiga

Keputusan ini mulai berlaku sejak dikeluarkannya dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Keempat

Surat Keputusan ini mulai berlaku dari tanggal dikeluarkannya sampai tanggal 30 April 2025 dan disampaikan kepada yang bersangkutan dengan ketentuan, bahwa segala sekuatnya akan disampaikan kembali apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Padang
Pada Tanggal 09 September 2024 M
Bablu Awaf 1446 H

Dekan,

Dr. Syafiq Haliah, M.A.
NIDN. 1026048305

**FAKULTAS ILMU SOSIAL
DAN ILMU POLITIK**

Kampus 1, Jln. Psair Kandang No. 4 Kota Tinggi, Padang

SURAT KEPUTUSAN
Nomor : 017/KEP/IL3.AU/F/2025

Tentang
**TIM PENGUJI SIDANG KOMPREHENSIF SARJANA STRATA SATU (S.1)
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2024/2025**

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, setelah:

- imbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas lulusan diperlukan pelaksanaan ujian sidang komprehensif bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UM Sumatera Barat;
- b. bahwa untuk melaksanakan ujian tersebut pada poin 1 diperlukan tim penguji sidang komprehensif;
- c. bahwa untuk pembentukan tim penguji pada poin 2 di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- ingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor. 8 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
5. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 178/L3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 02/PED/LO/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Menunjuk/mengangkat nama-nama dosen tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penguji Sidang Komprehensif mahasiswa Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat;
- dua : Menugaskan Tim Penguji dimaksud pada poin 1 untuk melaksanakan sidang komprehensif sesuai jadwal pada lampiran Surat Keputusan ini;
- etiga : Surat Keputusan ini berlaku semenjak dikeluarkan sampai dengan berakhir kegiatan. Jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 14 Sya'ban 1446 H
13 Februari 2025 M

Pis. Dekan,


lampiran 1 : Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
 nomor : 017/KEP/II.3.AU/F/2025
 tanggal : 14 Sya'ban 1446 H/ 13 Februari 2025 M
 tentang : TIM PENGUJI SIDANG KOMPREHENSIF SARJANA STRATA SATU (S.1)
 SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2024/2025

Hari/Tgl	Nama/NIM	Judul Skripsi	Penguji
Selasa / 13 Februari 2025 Waktu 09.00-14.00 WIB	Salwa Zahratih 21100008	Peran Perempuan di Pemerintahan Desa dalam Pengambilan Kebijakan (studi kasus di Desa Cipang Kanau Rokan Hulu Tahun 2021	Penguji 1 : Riko Riyanda, S.IP, M.Si Penguji 2 : Tesha Dwi Putri, S.IP, M.Si Dosen PA 1 : Lara Indah Yandri, S.IP, M.IP Dosen PA 2 : Didi Rahmadi, S.Sos, MA

Pjs. Dekan,

 Dr. Syarif Hidayatullah, M.A.
 NIDN. 0026048345



**FAKULTAS ILMU SOSIAL
DAN ILMU POLITIK**

Kampus 1 : Jln. Pasir Kandang No. 4 Koto Tangah, Padang
Telp (0751) 4851002, Fax (0751) 482274

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME

Nomor : 014/KET/II.3.AU/F/2025

Operator Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat menerangkan bahwa mahasiswa dengan identitas berikut :

Nama : Salwa Zahratih
NIM : 21100008
Program Studi : Ilmu Politik
Fakultas : Ilmu sosial dan Ilmu Politik
Judul Seminar : Peran perempuan di Badan Permusyawaratan Desa dalam pengambilan kebijakan (Studi kasus di desa Cipang Kanan Rokan Hulu Tahun 2021)

Menyatakan hasil plagiasi sebesar 20%. Hasil ini dinyatakan memenuhi persyaratan plagiasi kurang dari 30% pada setiap subbab naskah komprehensif yang disusun.

Demikian Surat Keterangan ini digunakan sebagai prasyarat untuk mengikuti ujian komprehensif.

Padang, 10 Februari 2025

Mengetahui
Dekan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Operator Ilmu Sosial dan Ilmu Politik


Dr. Syarifin Halim
NIK. 4026048305


Fadhil Muhammad Kamil, S.Pd
NIK. 2402207

Daftar Riwayat Hidup

Nama Lengkap : Saiwa Zabratin
Nim : 21100908
Tanggal/Tanggal Lahir : Kersik Putih, 04 Agustus 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat Sekarang : Jalan Adingero No.24 Batang Kabung Ganting, Koto Tengah Simpang Singalang, Kota Padang
Alamat Tetap : Dusun II Kersik Putih, Kecamatan Rokan IV koto Kabupaten RokanHulu, Rino
E-Mail : saiwabratina@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

- SDN 023 Rokan IV Koto: 2010-2015
- MTSN 2 Pasaman:2016- 2018
- SMAN 1 Rao: 2019-2021
- UM Sumatera Barat : 2021-2025

Riwayat Keorganisasian :

- Bendahara 2 Himapol UM SLIMBAR Periode 2021-2022
- Bidang Sdm Bem Ilmu Politik UM SUMBAR Periode 2023-2024
- Bidang Keperempuanan PK Amien Rais Periode 2022- 2023
- Bendahara PK Amien Rais Periode 2023-2024
- Bidang Keagamaan IPKP Periode 2020-2021
- Sekretaris Umum IPKP Periode 2023- 2024

NY: Setiap langkah dalam perjuangan penulisan adalah sebuah perjalanan menuju pengetahuan dan pemahaman. Bagi saya skripsi ini bukan hanya sebuah tugas, tetapi sebuah pencapaian yang patut dirayakan. Apresiasi untuk semua yang mendukung perjalanan ini, karena kita tidak pernah sendiri!

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN KUALITATIF

A. Perempuan yang Menjabat di Pemerintahan Desa Cipang Kanan

1. Sudah berapa lama Ibu menjabat di Bpd Cipang Kanan?
2. Apa yang memotivasi Ibu untuk bergabung di Bpd Cipang Kanan?
3. Bagaimana proses Ibu bisa menduduki jabatan ini?
4. Dalam rapat desa, bagaimana bentuk keterlibatan Ibu?
5. Kebijakan apa saja yang pernah Ibu usulkan?
6. Bagaimana tanggapan rekan kerja terhadap usulan Ibu?
7. Kesulitan apa yang Ibu hadapi dalam menjalankan tugas?
8. Bagaimana cara Ibu mengatasi kendala tersebut?
9. Apakah ada perlakuan berbeda karena Ibu seorang perempuan?
10. Bagaimana dukungan keluarga terhadap pekerjaan Ibu?
11. Apakah ada dukungan khusus dari pemerintah desa Cipang Kanan?
12. Bagaimana respon masyarakat terhadap kepemimpinan Ibu?
13. Bagaimana cara Ibu menyuarkan aspirasi perempuan?

B. Kepala Desa/Pejabat Desa Lainnya

1. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang keterlibatan perempuan dalam pemerintahan desa Cipang Kanan?
2. Apakah ada kebijakan khusus untuk mendorong partisipasi perempuan di pemerintahan desa Cipang Kanan?
3. Bagaimana kinerja perangkat desa perempuan di pemerintahan desa Cipang Kanan selama ini?
4. Bagaimana mekanisme pengambilan kebijakan di pemerintahan desa Cipang Kanan?
5. Bagaimana peran Bpd dalam penyusunan kebijakan desa?

6. Bagaimana koordinasi antara kepala desa dan Bpd Cipang kanan?
7. Bagaimana dukungan bapak/ibu terhadap anggota Bpd perempuan?
8. Apakah ada program yang mendorong partisipasi perempuan?
9. Menurut bapak/ibu, apa pentingnya keterlibatan perempuan di Bpd?

C. Ketua Bpd

1. Berapa jumlah anggota Bpd Cipang Kanan?
2. Bagaimana proporsi keterwakilan perempuan?
3. Bagaimana mekanisme rapat dan pengambilan keputusan di Bpd Cipang Kanan?
4. Kontribusi apa yang diberikan anggota perempuan di Bpd Cipang Kanan?
5. Apa contoh kebijakan yang dihasilkan bersama pemerintahan desa Cipang Kanan?

D. Masyarakat

1. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang perempuan yang menjabat di Bpd Cipang Kanan?
2. Apakah Bapak/Ibu pernah berinteraksi langsung dengan pejabat perempuan Bpd Cipang Kanan?
3. Apa harapan Bapak/Ibu terhadap peran perempuan di Bpd Cipang Kanan?
4. Bagaimana pelayanan yang diberikan oleh pejabat perempuan Bpd Cipang kanan?
5. Apa saran untuk peningkatan kinerja pejabat perempuan di Bpd Cipang Kanan?
6. Program apa yang bapak/ibu harapkan kedepannya di desa Cipang Kanan?
7. Bagaimana harapan Bapak/ibu untuk keterlibatan perempuan di pemerintahan desa Cipang Kanan?
8. Apa yang perlu diperbaiki dalam pelayanan, terkhusus tentang aspirasi perempuan?

9. Bagaimana cara meningkatkan partisipasi masyarakat desa Cipang Kanan?
10. Bagaimana pandangan bapak/ibu tentang perempuan di Bpd Cipang Kanan?
11. Apakah ada mengalami perubahan kebijakan selama beliau menjabat?
12. Kritik dan saran untuk pejabat perempuan Bpd Cipang Kanan?